

SKRIPSI

DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

INDRA APRILIANTO



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

SKRIPSI

DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

INDRA APRILIANTO

A11109284



Kepada

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

INDRA APRILIANTO

A11109284

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 8 November 2013

Pembimbing I



Dr. Agussalim, S.E., M.Si.

NIP. 19670817 199103 1 006

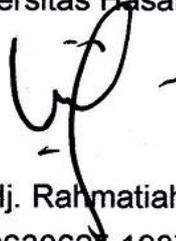
Pembimbing II



Dr. Sultan Suhab, S.E., M.Si.

NIP. 19691215 1999031 002

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hj. Rahmatiah, S.E., M.A.

NIP. 19630623 198703 2001

SKRIPSI

DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

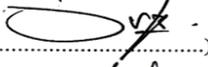
disusun dan diajukan oleh

INDRA APRILIANTO

A11109284

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **19 November 2013** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Agussalim, SE., M.Si	Ketua	()
2.	Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si.	Sekretaris	()
3.	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si.	Anggota	()
4.	Dr. Hj. Sri UndaiNurbayani, SE., M.Si.	Anggota	()
5.	Drs. Bachtiar Mustari, M.Si.	Anggota	()

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hj. Rahmatiah, S.E., M.A.
NIP. 19630625 198703 2001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : INDRA APRILIANTO
NIM : A11109284
Jurusan/program studi : ILMU EKONOMI/STRATA SATU (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 5 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 19 November 2013

Yang membuat pernyataan,



INDRA APRILIANTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya dan memberikan kekuatan serta segala kemudahan dalam menghadapi setiap masalah hidup, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat di Sulawesi Selatan”*** guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Muh.Ali, SE.,MS., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin..
2. Ibu Prof. Dr. Hj.Rahmatia, MA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. H.Agussalim, SE.,M.Si., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Sultan Suhab, S.E.,M.Si., selaku dosen Pembimbing II atas segala arahan, bimbingan dan saran serta waktu yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
4. Orang tuaku Kachung dan Ibu Khotimah yang telah membasarkanku. Alm. Purwoto dan Hj. Siti Mutinah yang melahirkan aku. Trima kasih atas kasih

sayang yang tulus, perhatian dan pengorbanan yang begitu besar serta doa yang tiada henti dipanjatkan untukku.

5. Bapak dan Ibu staf Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, atas bantuannya dalam pelayanan dan penyediaan data yang sangat membantu penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Bachtiar Mustari, M.si, Dr. Sri Undai Nurbayani, SE.,M.Si, dan Dr. Sanusi Fattah, S.E.,M.Si, selaku penguji yang telah memberikan saran yang sangat berguna bagi penulis.
7. Bapak Dr. Sultan Suhab, S.E.,M.Si, selaku penasihat akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perencanaan studi mata kuliah selama masa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
9. Pak Hardin, Pak Parman dan seluruh staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas info dan bantuannya dalam hal mengurus administrasi.
10. Keluarga besar Paldana, keluarga besarku di Malang, teman-teman seperjuangan di Makassar, Wiwien, Dewi, Sani, Afif, IP, Tini, Chali, Tami, Plelen alias Roban, Bisma Community.
11. Teman-teman Spartans IE'09 FEUH terima kasih atas kebersamaan dan berbagi semangatnya...ga usah disebutin satu persatu yaa....
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala amal baik kalian tersebut akan memperoleh balasan rahmat dan karunia dari Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Makassar, 19 November 2013

INDRA APRILIANTO

ABSTRAK

Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat di Sulawesi Selatan

Indra Aprilianto

Agussalim

Sultan Suhab

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dalam pembangunan suatu daerah yang kemudian berdampak pada ketimpangan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui ketimpangan wilayah dan ketimpangan wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan. Data tersebut diolah dengan menggunakan software komputer (eviews 7.0). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui ketimpangan wilayah, dan ketimpangan wilayah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah tidak terdapat pengaruh.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Kemiskinan.

ABSTRACT

Impact of Economic Growth and Regional Inequality Against Welfare Society in South Sulawesi

Indra Aprilianto

Agussalim

Sultan Suhab

Economic growth is an important part in the development of a diaerah which then have an impact on an area inequality and welfare. This study aims to determine the impact of economic growth on social welfare, both directly and indirectly through the area inequality and inequality of the social welfare area. The method used in this study is a panel data using secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) South Sulawesi. The data is processed using computer software (evIEWS 7.0). The results showed that economic growth has a positive effect on the welfare of the people either directly or indirectly through a region inequality, and inequality territory positive effect on the welfare of society. Between economic growth and inequality region there is no effect.

Keywords : Human Development Index , Economic Growth , and Poverty Level

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1.1 Tinjauan Teoritis Pertumbuhan Ekonomi	8
2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	12
2.2 Konsep Ketimpangan.....	14
2.2.1 Penyebab Ketimpangan	19
2.2.2 Pengukuran Ketimpangan	22
2.3 Konsep Kesejahteraan.....	25
2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia	28
2.3.2 Pembangunan Manusia Dan Pengukurannya.....	30
2.4 Hubungan Antar Variabel	32
2.4.1 Hubungan antar Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan.....	32
2.4.2 Hubungan antar Pertumbuhan Ekonomi dengan Kesejahteraan.....	35
2.4.3 Hubungan Ketimpangan dan Kesejahteraan.....	37
2.5 Penelitian Terdahulu	39
2.6 Kerangka Pemikiran.....	42
2.7 Hipotesis	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Lokasi Penelitian	46

3.2 Jenis dan Sumber Data.....	46
3.3 Teknik Pengumpulan Data	46
3.4 Metode Analisis.....	46
3.5 Uji Statistik	48
3.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R-square)	48
3.5.2 Uji F (F_{test})	48
3.5.2 Uji T (T_{test})	48
3.6 Defenisi Operasional Variabel.....	49
 BAB IV Hasil dan Pembahasan	 51
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	51
4.1.1 Kondisi Geografis	51
4.1.2 Kondisi Demografis	52
4.2 Perkembangan Variabel Penelitian	54
4.2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011.....	54
4.2.2 Perkembangan Indeks Williamson Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011	58
4.2.3 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011	60
4.3 Hasil Analisis ekonometrika.....	65
4.3.1 Hasil Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Ketimpangan Wilayah	65
4.3.1.1 Hasil Analisis Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi Terhadap kesejahteraan Masyarakat	65

4.3.2 Hasil Analisis Ketimpangan Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	66
4.3.3 Hasil Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Wilayah	67
4.3.4 Hasil Uji Statistik.....	67
4.3.4.1 Keefisien Determinasi (R-Square).....	67
4.3.4.2 Pengujian Signifikansi Secara Simultan (Uji –F).....	69
4.3.4.3 Pengujian Signifikansi Secara Parsial (Uji –T).....	70
4.4 Pembahasan Hasil Estimasi.....	71
4.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Ketimpangan Wilayah.....	71
4.4.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Wilayah	74
4.4.3 Pengaruh Ketimpangan Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	76
BAB V Kesimpulan Dan Saran.....	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2011 ...	53
Tabel 4.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan Tahun 2007 - 2011	56
Tabel 4.3	Indeks Williamson Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2007 - 2011	59
Tabel 4.4	IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2007 - 2011	61
Tabel 4.5	Indeks Komposit IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2007 - 2011	63
Tabel 4.6	Hasil Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Ketimpangan Wilayah.....	65
Tabel 4.7	Hasil Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	66
Tabel 4.8	Hasil Analisis Pengaruh Ketimpangan Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	66

Tabel 4.9 Hasil Analisis Pertumbuhan Ekonomi	
Terhadap Ketimpangan Wilayah.....	67
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik R-Square	68
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik (Uji – F).....	69
Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik (Uji – T).....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Sulawesi Selatan	2
Gambar 1.2 Perbandingan IPM Indonesia dan Sulawesi Selatan	4
Gambar 2.1 Kurva “U” Terbalik	18
Gambar 2.2 Perbandingan Distribusi GNP Brazil dan Hongaria.....	34
Gambar 2.3 Kerangka pikir	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

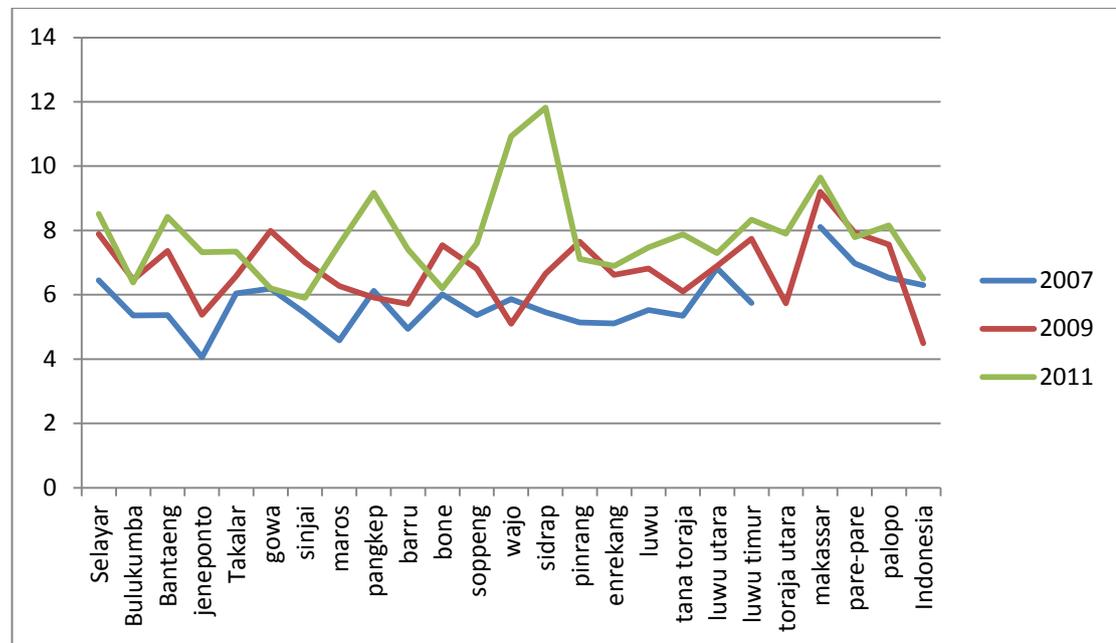
Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Mempunyai tingkat pertumbuhan yang diatas rata-rata pertumbuhan nasional, hal ini menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu Provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang tercepat di antara Provinsi lain di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang menunjukkan tren positif membuat provinsi ini menjadi magnet tersendiri bagi perekonomian, hal ini menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan menggunakan sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut. Kemampuan daerah untuk tumbuh sangat ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi yang adakalanya satu sama lain saling mempengaruhi.

Tingginya tingkat pertumbuhan akan mengakibatkan naiknya produktifitas perekonomian sehingga tingkat pendapatan juga mengalami kenaikan. Tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang dimiliki Sulawesi Selatan ternyata tidak dibarengi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat secara signifikan, hal ini tidak sesuai dengan prestasi yang dimiliki dimana tingkat pertumbuhannya rata-rata berada diatas nasional yang seharusnya berdampak pada meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan tingginya tingkat

pembangunan manusia. Gambar di bawah ini menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Sulawesi Selatan dan Indonesia.

Gambar 1.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Sulawesi Selatan



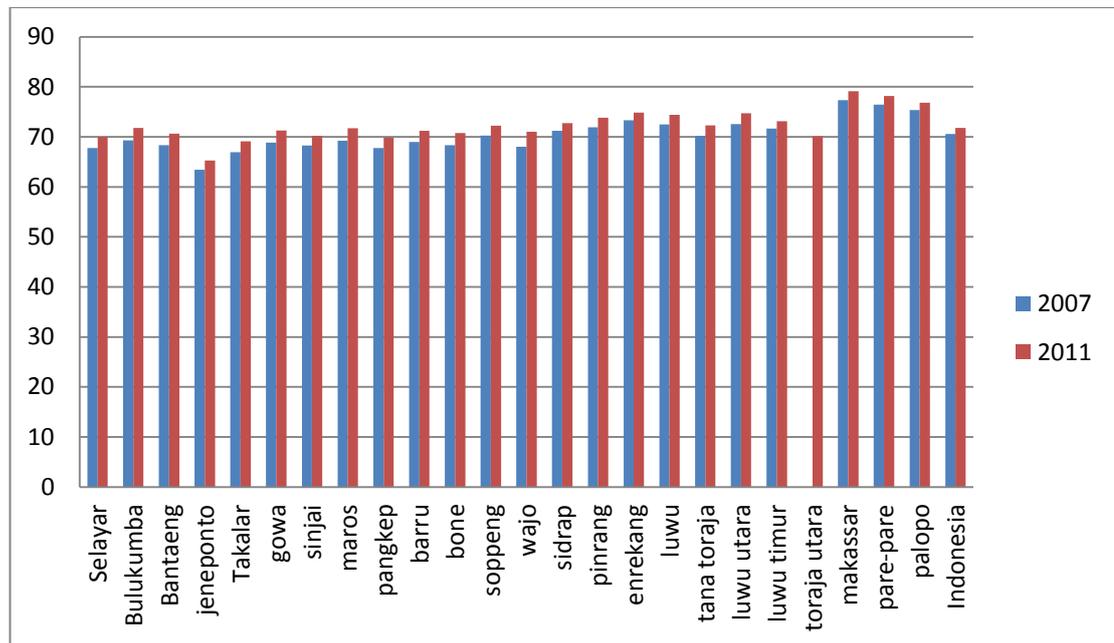
Sumber: Badan pusat Statisti Provinsi Sulawesi Selatan, 2012

Besar kecilnya Produk Domestik Regional bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh suatu wilayah dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam yang telah dimanfaatkan, jumlah dan mutu sumber daya manusia, kebijaksanaan pemerintah, letak geografis, serta tersedianya sarana dan prasarana. Dalam menghitung pendapatan regional (PDRB), BPS memasukkan seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor yang melakukan usahanya di suatu wilayah tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksi, dengan demikian PDRB secara keseluruhan menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan pada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut (Puspandika, 2007)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama ini dipercaya sebagai salah satu indikator utama yang dipergunakan untuk melihat dan mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Sampai kemudian UNDP mengajukan indikator lain yang dianggap lebih baik guna mengukur keberhasilan pembangunan (Yunitasari, 2007). Dalam hal ini digunakan tiga kategori indikator pengukuran yang merepresentasikan kesejahteraan di suatu wilayah, yaitu pengeluaran konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Penggunaan ketiga kategori indikator ini mengacu pada konsep IPM yang diperkenalkan oleh UNDP.

Dalam gambar 1.1 dapat kita lihat bahwa tingkat pertumbuhan yang dimiliki Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan secara umum selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi yang dimiliki oleh nasional (Indonesia). Akan tetapi pada gambar 1.2 dibawah ini dimana menjelaskan tentang kesejahteraan, Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan secara umum masih berada di bawah peringkat IPM yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup menjadi senjata utama menuju kesejahteraan, dalam beberapa kasus terjadi ketimpangan antara pertumbuhan yang tinggi dengan tingkat kesejahteraan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Dalam IPM terdapat unsur-unsur kesejahteraan diantaranya pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang mewakili tingkat kesejahteraan masyarakat yang sampai saat ini dianggap paling ideal.

Gambar 1.2
Perbandingan IPM Indonesia dan Sulawesi Selatan



Sumber: Badan pusat Statistik Provinsi Sulawesi selatan, 2012

Seperti yang dijelaskan oleh Soubottina (2004) bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan, lebih lanjut dijelaskan bahwa di beberapa negara kemiskinan semakin memburuk meskipun pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tinggi, karena meningkatnya ketimpangan pendapatan. Hal tersebut berakibat pada kurangnya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar sehingga berpengaruh terhadap pembangunan manusia.

Ketidakpuasan dan kritik yang kemudian timbul dalam proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sehubungan dengan pertumbuhan yang telah dicapai akan tetapi karena perkembangan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut kurang mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, bahkan ketimpangan pendapatan semakin besar dan telah menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya

pengangguran, kurangnya sarana kesehatan dan pendidikan, perumahan, kebutuhan pokok, rasa aman, dan lain- lain.

Di samping itu, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan akan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau PDRB yang terus menerus.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pembangunan adalah masalah ketimpangan, baik ketimpangan yang terjadi antar wilayah maupun ketimpangan yang terjadi di dalam wilayah. Ketimpangan tersebut terlihat dari perbedaan karakteristik wilayah Sulawesi Selatan dalam hal kepemilikan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), kondisi sosial dan budaya serta letak demografis wilayah tersebut. Karena karakteristik wilayah mempunyai pengaruh yang kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, maka tidak mengherankan bila pola pembangunan ekonomi wilayah di Sulawesi Selatan tidak seragam.

Ketimpangan wilayah selama ini berlangsung dan nampak dalam berbagai bentuk aspek dan dimensi. Bukan hanya berupa ketimpangan hasil pembangunan dalam hal output regional, tetapi juga dalam hal kesejahteraan masyarakat. Output regional disini merupakan konsep analisa yang dipresentasikan oleh indicator Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Ketimpangan tersebut terlihat dari perbedaan karakteristik wilayah Indonesia dalam hal kepemilikan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya

Manusia (SDM), kondisi sosial dan budaya serta letak demografis wilayah tersebut. Karena karakteristik wilayah mempunyai pengaruh yang kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, maka tidak mengherankan bila pola pembangunan ekonomi wilayah di Sulawesi Selatan tidak seragam.

Pembangunan perekonomian yang mengacu pada kesejahteraan dalam hal ini direpresentasikan oleh indikator-indikator IPM, merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembangunan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu dan harus memperhatikan aspek pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya. Dengan kata lain, peningkatan kualitas modal manusia juga akan memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antar daerah, sehingga ketimpangan yang selama ini terjadi dapat ditekan yang selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Sulawesi Selatan ?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui ketimpangan wilayah di Sulawesi Selatan ?
3. Apakah ketimpangan wilayah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah di Sulawesi Selatan.
2. Mengetahui adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui ketimpangan wilayah di Sulawesi Selatan.
3. Mengetah adanya pengaruh ketimpangan wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait lainnya sebagai pengambil keputusan untuk dapat membuat kebijakan yang tepat dalam perekonomian.
2. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni
3. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak lain yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini secara lebih luas dan mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Setiap negara di dunia ini sudah lama menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi faktor yang paling penting dalam keberhasilan perekonomian suatu negara untuk jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan dan dianggap sebagai sumber peningkatan standar hidup penduduk yang jumlahnya terus meningkat.

Tambunan (2003), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.

Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dan sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau PDRB yang terus menerus. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan

ekonomi adalah penambahan PDRB, yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu, proses, output per kapita, dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, output per kapita mengaitkan aspek output total (GDP) dan aspek jumlah penduduk, sedangkan jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian.

Teori pertumbuhan ekonomi digambarkan sebagai penjelasan dari faktor-faktor yang menentukan kenaikan output per kapita suatu masyarakat dalam jangka tertentu dan interaksinya yang menimbulkan proses pertumbuhan ekonomi. Terdapat berbagai macam pendapat para ahli ekonomi mengenai pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan perbedaan persepsi dan cara pandang masing-masing ahli dalam merumuskan teorinya.

Pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh karena faktor kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk, kemajuan teknologi tergantung dari pembentukan modal. Dengan adanya akumulasi modal akan memungkinkan dilaksanakannya spesialisasi sehingga produktifitas tenaga kerja dapat ditingkatkan, dampaknya akan mendorong penambahan investasi (pembentukan modal) dan persediaan modal (capital stock), yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kemajuan teknologi dan menambah pendapatan (Adisasmita, 2009). Bertambahnya pendapatan hal ini berarti terjadi peningkatan kesejahteraan yang kemudian akan mendorong bertambahnya jumlah penduduk

yang kemungkinan akan menyebabkan berlakunya law of diminishing returns yang selanjutnya akan menyebabkan turunnya akumulasi modal.

Karl Marx dalam bukunya *Das Kapital* dalam Mudrajad (1997) membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yaitu dimulai dari *feodalisme*, *kapitalisme* dan kemudian yang terakhir adalah *sosialisme*. Evolusi perkembangan masyarakat ini akan sejalan dengan proses pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat feodalisme mencerminkan suatu kondisi dimana perekonomian yang ada masih bersifat tradisional. Dalam tahap ini tuan tanah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar menawar tertinggi relatif terhadap pelaku ekonomi lain. Perkembangan teknologi yang ada menyebabkan terjadinya pergeseran di sektor ekonomi, dimana masyarakat yang semula agraris-feodal kemudian mulai beralih menjadi masyarakat industri yang kapitalis.

Lebuh lanjut Marx dalam Poli (2009) mengatakan nilai suatu barang ditentukan oleh nilai tenaga kerja yang telah dikorbankan untuk menghasilkan suatu barang, baik tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi barang tersebut, maupun tenaga kerja yang terkandung didalam modal yang digunakan dan bahan mentah yang habis pakai, karena didalam kenyataannya kaum buruh tidak menerima upah sebesar seluruh nilai yang dihasilkan maka ada nilai lebih yang ditahan oleh kapitalis sebagai laba. Kian maju teknologi makin besar nilai lebih yang ditahan oleh kapitalis untuk dirinya, hal mana yang berarti kian besar penghisapan terhadap kaum buruh. Terjadinya substitusi dari manusia ke teknologi yang pada akhirnya akan menyebabkan revolusi social yang dilakukan oleh kaum buruh. Hal ini merupakan tonggak baru bagi munculnya suatu tatanan social yang baru.

Menurut teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Rostow, negara-negara maju seluruhnya telah melampaui tahapan yang dinamakan "tinggal

landas menuju pertumbuhan ekonomi berkesinambungan yang berlangsung secara otomatis". Sedangkan negara-negara yang sedang berkembang atau masih terbelakang, pada umumnya masih berada didalam tahapan masyarakat tradisional atau tahapan kedua, yakni tahapan penyusunan kerangka dasar tinggal landas. Tidak lama lagi, hanya tinggal merumuskan serangkaian aturan pembangunan untuk tinggal landas, mereka akan segera bergerak menuju ke proses pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkesinambungan (Todaro, 2006). Rostow membagi tingkat-tingkat pertumbuhan berdasarkan proses pembangunan ekonomi suatu negara menjadi lima tahapan, yaitu: 1) tahap perekonomian tradisional, 2) tahap pra kondisi tinggal landas, 3) tahap tinggal landas, 4) tahap menuju kedewasaan, 5) tahap konsumsi massa tinggi.

Model pertumbuhan Harrod-Domar dibangun berdasarkan pengalaman Negara maju. Kesemuannya terutama dialamatkan kepada perekonomian kapitalis maju dan mencoba menelaah persyaratan pertumbuhan mantap (*steady growth*) dalam perekonomian seperti itu (Jinghan, 2007). Agar bisa tumbuh dengan pesat, setiap perekonomian harus menyisihkan atau menabung sebagian dari GDP-nya sebanyak mungkin. Dalam Todaro (2006) semakin banyak bagian dari GDP yang ditabung dan kemudian diinvestasikan, maka laju pertumbuhan perekonomian akan semakin cepat.

Pada dasarnya, Lewis membagi dua sektor dalam teorinya (Todaro, 2006) yaitu: 1) sektor tradisional, dimana dijelaskan sektor pedesaan subsisten yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktifitas marjinal tenaga kerja yang sama dengan nol, ini merupakan situasi yang memungkinkan untuk mendefinisikan kondisi *surplus tenaga kerja* sebagai suatu fakta bahwa jika sebagian tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian maka sektor itu tidak kehilangan outputnya, 2) sektor industry kota yang modern yang tingkat

produktifitasnya tinggi menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit-demi sedikit dari sector subsisten. Fokus utama dari teori ini adalah terjadinya proses pengalihan tenaga kerja , pertumbuhan output, serta penyerapan tenaga kerja di sektor modern yang berasal dari sektor subsisten.

2.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Jhingan (2007) dan Sukirno (2002) menjelaskan proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan non-ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia modal, usaha, teknologi, dan sebagainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Di dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan merupakan faktor non-ekonomi.

Sumber daya alam yang dimiliki suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan laut yang dapat diperoleh, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat, dan semua yang terdapat di wilayah kekuasaan suatu wilayah.

Jumlah kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu wilayah terutama pada masa-masa permulaan proses pertumbuhan ekonomi. Di dalam suatu wilayah dimana proses pertumbuhan ekonomi baru dimulai, biasanya terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses pembangunan. Kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli, kekurangan para pengusaha untuk mengembangkan perekonomian di satu pihak, dan terbatasnya pasar bagi katifitas perekonomian di lain pihak, membatasi kemungkinan untuk menjalankan aktifitas perekonomian. Namun apabila suatu wilayah mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan

dengan menguntungkan, hambatan-hambatan tersebut kemungkinan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat dengan adanya modal yang cukup, teknologi dan teknik produksi yang baik, dan tenaga ahli sehingga sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan secara efisien dan menguntungkan.

Jumlah penduduk juga menjadi pengaruh bagi pertumbuhan ekonomi, penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan memungkinkan suatu wilayah menambah jumlah produksi. Disamping itu sebagai akibat dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja kemahiran penduduk akan bertambah tinggi sehingga produktifitas akan bertambah. Pengusaha yang merupakan bagian dari penduduk juga memegang peranan penting dalam aktifitas perekonomian. Pertambahan jumlah penduduk juga akan menambah luasnya pasar. Maka bertambahnya jumlah penduduk akan menambah luasnya pasar dapat mendorong aktifitas perekonomian. Akibat buruk dengan pertambahan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dihadapi oleh masyarakat yang kemajuan ekonominya belum baik tetapi telah menghadapi masalah jumlah penduduk. Apabila didalam perekonomian sudah berlaku keadaan dimana penambahan tenaga kerja tidak dapat menaikkan produksi yang tingkatnya tidak lebih cepat dari pertumbuhan penduduk, pendapatan perkapita akan menurun, dengan demikian penduduk yang berlebihan akan menyebabkan kemerosotan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Barang modal menjadi penting artinya bagi pertumbuhan ekonomi karena dapat mempertinggi efisiensi jumlah penduduk. Di dalam tingkat masyarakat yang kurang maju sekalipun, keberadaan barang modal sangat besar peranannya dalam kegiatan perekonomian. Tanpa adanya alat berburu dan bercocok tanam masyarakat yang kurang maju akan menghadapi kesulitan dalam mencari kebutuhan hidup sehari-harinya. Apabila barang modal saja yang

bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami peningkatan, kemajuan yang akan dicapai jauh lebih rendah dari yang dialami di masa kini. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa akibat yang positif dalam pertumbuhan ekonomi dan oleh karena itu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat jalannya. Kemajuan teknologi akan dapat mempertinggi efisiensi produksi dan menimbulkan penemuan baru sehingga dapat meningkatkan mutu barang dan jasa yang diproduksi.

Sistem masyarakat juga menentukan sampai sejauh mana pertumbuhan ekonomi akan dicapai. Apabila dalam masyarakat terdapat beberapa keadaan yang mungkin menghambat laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus mengambil peran dalam mengatasinya. Penghapusan kekuasaan tuan tanah misalnya, adalah suatu kebijakan yang bisa diterapkan agar masyarakat bekerja lebih keras untuk mendapatkan pendapatan dan keuntungan yang lebih baik. Salah satu langkah yang penting dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memperluas pendidikan.

Dalam perekonomian yang maju luas pasar juga penting peranannya dalam menumbuhkan perekonomian. Bahkan luas pasar akan menjadi penghambat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara maju. Tingkat kegiatan didalam suatu perekonomian juga ditentukan oleh permintaan yang efektif, sehingga pertumbuhan ekonomi bergantung kepada perkembangan dari permintaan yang efektif tersebut dalam jangka panjang.

2.2 Konsep Ketimpangan

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat

dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Development Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdevelopment Region*). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini akan membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah.

Dalam konteks Negara, pembangunan ekonomi membutuhkan kontribusi dari GNI yang tinggi dan tumbuh dengan cepat. Namun yang perlu digaris bawahi adalah bukan hanya bagaimana menumbuhkan GNI dalam proses pembangunan tersebut, tetapi juga siapa yang berkontribusi menumbuhkan GNI tersebut, sebagian masyarakat yang berada dalam sebuah negara atau hanya segelintir orang di dalamnya. Jika yang menumbuhkan hanya orang-orang kaya yang jumlahnya hanya segelintir saja, maka manfaat pertumbuhan GNI itu hanya akan dinikmati oleh mereka saja, sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akan semakin parah (Todaro, 2006).

Ketimpangan pendapatan sebenarnya telah terjadi di seluruh negara di dunia ini, baik negara yang sudah maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Namun perbedaannya adalah ketimpangan pendapatan lebih besar terjadi di negara-negara yang baru memulai pembangunannya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi tingkat pembangunannya cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya rendah. Keadaan ini antara lain dijelaskan oleh Todaro (2006) bahwa, negara-negara maju secara keseluruhan memperlihatkan pembagian pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan negara-negara dunia ketiga yakni kelompok negara yang tergolong sedang berkembang.

Dua model ketimpangan yaitu teori Harrod-Domar dan Neo-Klasik, memberikan perhatian khusus pada peranan kapital yang dapat dipresentasikan

dengan kegiatan investasi yang ditanamkan pada suatu daerah untuk menarik kapital ke dalam daerahnya, hal ini jelas akan berpengaruh pada kemampuan daerah untuk bertumbuh sekaligus untuk menciptakan perbedaan dalam kemampuan untuk menghasilkan pendapatan. Investasi akan lebih menguntungkan bila dialokasikan di daerah-daerah yang dinilai mampu menghasilkan *return* (pengembalian) yang besar dalam waktu yang relatif cepat. Mekanisme pasar justru akan menyebabkan ketidakmerataan dimana daerah-daerah yang relatif maju akan bertumbuh semakin cepat sementara daerah yang kurang maju justru relatif lambat. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan antar daerah. Sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam mengarahkan alokasi investasi menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih berimbang di seluruh wilayah dalam negara.

Terjadinya ketimpangan antar daerah juga diterangkan oleh Myrdal (1957) dalam Tambunan (2003) yang membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya di sekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskan hal tersebut, dikembangkan ide *spread effect* dan *backwash effect* sebagai bentuk pengaruh penjalaran dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. *Spread effect* didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang menguntungkan (*favorable effect*), yang mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi dari pusat pertumbuhan ke wilayah sekitar. *Backwash effect* didefinisikan sebagai pengaruh yang merugikan (*infavorable effect*) yang mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar/pinggiran termasuk aliran modal ke wilayah inti, sehingga mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti. Terjadinya ketimpangan regional

menurut Myrdal disebabkan oleh besarnya pengaruh *backwash effect* dibandingkan dengan *spread effect* di negara-negara terbelakang.

Myrdal menjelaskan bahwa pertumbuhan suatu wilayah akan mempengaruhi wilayah di sekitarnya melalui dampak baik (*backwas effect*) dan dampak sebar (*spread effect*). *Backwash effect*, hal ini terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah mengakibatkan terjadinya perpindahan sumber daya (tenaga kerja, modal, dll) dari wilayah di sekitarnya (mis: wilayah A ke wilayah B). sehingga wilayah A (yang pada awalnya merupakan wilayah yang lebih maju dibandingkan wlayah B), akan semakin maju dan wilayah B akan semakin tertinggal. Karena migrasi itu bersifat selektif (yaitu dilakukan oleh penduduk yang mempunyai ketrampilan dan keahlian), maka cenderung akan menguntungkan wilayah atau daerah yang mengalami pertumbuhan yang cepat dan merugikan daerah di sekitarnya. *Spread effect* terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah mengakibatkan pertumbuhan terhadap wilayah disekitarnya (mis: wilayah A terhadap wilayah B), yang memproduksi bahan mentah untuk keperluan industri yang sedang tumbuh di wilayah tersebut, dan wilayah yang mempunyai industri barang-barang konsumsi akan terangsang. Selanjutnya Myrdal menyimpulkan ketimpangan wilayah disebabkan oleh lemahnya dampak sebar (*spread effect*) dan kuatnya dampak balik (*backwash effect*).

Perpindahan modal cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Permintaan yang meningkat ke wilayah maju akan merangsang investasi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan yang menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang. Perbedaan kemajuan wilayah berarti tidak samanya kemampuan untuk

bertumbuh sehingga yang timbul adalah terjadinya ketidakmerataan antar daerah. Sehubungan dengan hal ini muncul pendapat dan studi-studi empiris yang menempatkan pemerataan dan pertumbuhan pada suatu posisi yang dikotomis. Dalam hal ini Kuznets dalam Tambunan (2003) mengemukakan suatu hipotesa yang terkenal dengan sebutan "Hipotesis U terbalik".

Gambar 2.1

Kurva "U" terbalik (hipotesis Kuznets)



Hipotesis ini dihasilkan melalui suatu kajian empiris terhadap pola pertumbuhan sejumlah negara di dunia, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi terjadi *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan. Seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi maka setelah menghadapi tahap tertentu *trade-off* tersebut akan menghilang diganti dengan hubungan korelasi positif antara pertumbuhan dan pemerataan. Pola ini disebabkan karena pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung dipusatkan pada sektor modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Ketimpangan membesar karena kesenjangan antar sektor modern dan

tradisional meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena perkembangan di sektor modern lebih cepat dibandingkan dengan sektor tradisional.

Dari periode 1970-an hingga sekarang sudah banyak studi empiris yang menguji hipotesis Kuznets tersebut dengan menggunakan data agregat dari sejumlah negara (Tambunan,2003). Beberapa catatan penting dari penemuan-penemuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, sebagian besar studi-studi tersebut mendukung hipotesis Kuznets, sedangkan, sebagian lainnya menolak atau tidak menemukan adanya korelasi seperti pada Gambar 2.1. Kedua, walaupun secara umum hipotesis ini diterima, namun sebagian besar dari studi-studi tersebut menunjukkan bahwa relasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan pada periode jangka panjang hanya terbukti nyata untuk kelompok negara-negara dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Ketiga, bagian kesenjangan dari kurva Kuznets (bagian kiri pada Gambar 2.1) cenderung lebih tidak stabil dibandingkan porsi kesenjangan menurun dari kurva tersebut. Kesenjangan cenderung menurun untuk negara-negara pada tingkat pendapatan menengah dan tinggi.

Salah satu kajian yang menguatkan hipotesis Kuznet tersebut dilakukan oleh Williamson (1965) dalam Tambunan (2003). Williamson untuk pertama kalinya menyelidiki masalah ketimpangan antar daerah dengan membobot perhitungan *coefficient of variation (CV)* dengan jumlah penduduk menurut wilayah. Dalam studinya ia menemukan bahwa dalam tahap awal pembangunan ekonomi disparitas dalam distribusi pendapatan akan membesar dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang pada awalnya sudah relatif maju, misalnya dalam pembangunan industri, infrastruktur, dan SDM. Kemudian dalam tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, terjadi konvergensi dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan mengalami penurunan.

2.2.1 Penyebab Ketimpangan

Ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh beberapa hal, beberapa diantaranya yaitu :

1. Perbedaan Sumber Daya Alam

Penyebab utama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Ada daerah yang mempunyai minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak mempunyai. Ada daerah yang mempunyai deposit batubara yang cukup besar, tapi daerah lain tidak ada. Demikian pula halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah. Daerah dengan kandungan sumberdaya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam akan lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah.

2. Perbedaan Kondisi Demografis

Faktor utama lainnya yang dapat mendorong terjadinya ketimpangan antar wilayah adalah perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksud disini

meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah yang bersangkutan. Kondisi demografis ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan.

3. Kurang Lancarnya Mobilitas Antar Barang

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi atau daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya

4. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi

kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya bilamana, konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.

5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah

Investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan dapat pula mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya terjadi bilamana investasi pemerintah dan swasta yang masuk kesuatu daerah ternyata lebih rendah.

2.2.2. Pengukuran Ketimpangan

Penyajian ketimpangan pendapatan antar daerah pada dasarnya hanyalah memberikan gambaran secara makro mengenai ketimpangan pendapatan rata-rata antara berbagai wilayah tertentu dan tidak memperlihatkan pola pembagian pendapatan antar golongan penerima pendapatan. Todaro (2006) menggambarkan ketimpangan dengan mempertimbangkan hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dan tingkat ketimpangan pendapatan untuk negara maju dan negara sedang berkembang dan menggambarkan ketimpangan

dari negara- negara tersebut dalam tiga kelompok, dimana pengelompokan ini disesuaikan dengan tinggi, sedang dan rendahnya tingkat pendapatan yang diukur menurut koefisien Gini dan produk nasional bruto.

Distribusi pendapatan daerah menggambarkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu daerah di kalangan penduduknya (Todaro, 2006). Dalam melakukan pengukuran terhadap ketimpangan pendapatan khususnya antar daerah perkotaan dan perdesaan, maka ukuran yang sering digunakan dalam mengukur ketimpangan ini adalah rasio konsentrasi Gini yang sering disebut dengan koefisien Gini atau indeks Gini, dengan rumus:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n (x_{i+i} - x_i) (y_i + y_{i+i})$$

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n f_i (y_i + y_{i+i})$$

Dimana:

G = Rasio Gini

F_i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas- i

X_i = Proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas- i

Y_i = Proporsi jumlah pendapatan dalam kelas- i .

Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar dari angka 0 sampai 1, yang menjelaskan kadar pemerataan pendapatan. Koefisien yang semakin mendekati 0 berarti distribusi pendapatan semakin merata, koefisien yang mendekati 1 berarti distribusi pendapatan semakin timpang. Pada prakteknya, koefisien Gini untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0.50 sampai 0.70, sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata, angkanya berkisar antara 0.20 hingga 0.35 (Todaro, 2006).

Selain itu, cara pengukuran lainnya yang juga umum digunakan, terutama oleh Bank Dunia, adalah dengan penetapan kriteria ketidakmerataan didasarkan

atas porsi pendapatan suatu daerah yang dinikmati oleh tiga lapis penduduk (Dumairy dalam Puspandika, 2007) yakni 40 persen penduduk berpendapatan terendah (penduduk termiskin); 40 persen penduduk berpendapatan menengah; serta 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi (penduduk terkaya). Ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan dinyatakan parah jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menikmati kurang dari 12 persen pendapatan, ketimpangan dianggap sedang jika 40 persen penduduk termiskin menikmati 12- 17 persen dari pendapatan. Sedangkan jika 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah (penduduk termiskin) menikmati 17 persen dari pendapatan maka ketimpangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan dianggap cukup merata.

Untuk mengukur kesenjangan antar wilayah, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, dan dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan melalui perhitungan Indeks Williamson. Secara ilmu Statistik, index ini sebenarnya adalah *coefficient of variation* yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah *Williamson Index* muncul sebagai penghargaan kepada Jeffrey G. Williamson yang mula-mula menggunakan teknik ini untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Walaupun index ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks cukup lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Berbeda dengan *Gini Rasio* yang lazim digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan, *Williamson Index* menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan

tingkat kemakmuran antar kelompok. Indeks ini dapat dihitung dengan rumus (Sjafrizal, 2008) :

$$CV_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{y})^2 f_i / n}}{\bar{y}}$$

Dimana :

CV_w = Indeks ketimpangan pendapatan wilayah

f_i = Jumlah penduduk di kabupaten/kota i

n = Jumlah penduduk total

Y_i = Pendapatan perkapita di kabupaten/kota i

Y = Rata-rata pendapatan perkapita untuk semua daerah

Batasan tingkat ketimpangan antar wilayah dengan menggunakan ukuran ini, yaitu:

- a. Nilai indeks 0,7 – 1, terjadi ketimpangan yang tinggi
- b. Nilai indeks 0,4 – 0,6, terjadi ketimpangan yang sedang
- c. Nilai indeks < 0,3, terjadi ketimpangan yang rendah

2.3 Konsep Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu adalah cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu secara objektif, yaitu membandingkan kesejahteraan individu pada situasi yang berbeda. Kesejahteraan sosial merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan sosial secara objektif

yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kepuasan individu dalam masyarakat (Badrudin, 2012).

Menurut Arsyad (2010) dan Sukirno (2006) dalam Badrudin (2012) tingkat pendapatan perkapita tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan karena kelemahan yang bersumber pada ketidaksempurnaan dalam perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dan kelemahan yang bersumber dari kenyataan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat bukan hanya ditentukan oleh tingkat pendapatan tetapi juga oleh faktor-faktor lain.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Nordhaus dan Tobin mengenalkan *Net Economic Welfare (NEW)* dalam perhitungan pendapatan nasional (Arsyad, 2010 dalam Badrudin 2012). Indikator *New* menyempurnakan nilai PDB sebagai indikator kesejahteraan masyarakat agar diperoleh indikator ekonomi yang lebih baik, yaitu dengan koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif adalah dengan menambahkan penambahan waktu senggang dan perekonomian sektor informal dalam perhitungan PDB. Koreksi negatif adalah mengurangi biaya kerusakan lingkungan sebagai dampak kegiatan pembangunan dalam perhitungan PDB.

Kesejahteraan masyarakat yang selama ini diukur menggunakan indikator moneter dirasa masih kurang sempurna, oleh karena itu Beckerman (Sukirno, 2006 dalam Badrudin, 2012) membedakan indikator kesejahteraan masyarakat dalam tiga kelompok, yaitu : 1) Kelompok yang berusaha membandingkan kesejahteraan di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori oleh Collin Clark, Gilbert, dan Kravis. 2) Kelompok yang berusaha untuk menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga di setiap negara. 3) Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan tiap

negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi minyak yang dipelopori oleh Bennet.

United Nations Research Institut for social development menyusun delapan belas indikator yang apabila digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat maka perbedaan tingkat pembangunan antara negara maju dan negara berkembang tidak terlampau besar seperti yang digambarkan oleh tingkat pendapatan per kapita negara masing-masing.

Gagasan lain untuk menyempurnakan indikator kesejahteraan masyarakat terus menerus terus disempurnakan hingga muncul gagasan menggunakan *Physical Quality of life Index (PQLI)* atau *Basic Need approach*. Dalam perkembangannya indikator ini dirasa belum memuaskan karena tingkat pendapatan, kecukupan sandang, pangan, dan perumahan belum dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat (Arsyad dalam Badrudin, 2012).

Untuk menyempurnakan PQLI, maka *United Nations Development Programe (UNDP)* mulai tahun 1990 telah menyusun suatu indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Laporan ini menganggap bahwa pembangunan manusia pada hakekatnya adalah suatu proses memperbesar pilihan-pilihan manusia. Indikator kesejahteraan masyarakat yang disusun oleh UNDP dikenal dengan *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM)(Sasana, 2009).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah (Todaro,2006). Indikator IPM jauh melebihi pertumbuhan konvensional.

Pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya, namun pertumbuhan bukan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan hanyalah salah satu alat, yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya tersebut (Kuncoro, 2003).

Salah satu keuntungan HDI adalah, indeks ini mengungkapkan bahwa sebuah negara/daerah dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar hanya berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia. HDI juga menyampaikan bahwa pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan manusia dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Indikator kesenjangan pembangunan dan pemerinkatan yang baik harus memasukkan variabel kesehatan dan pendidikan dalam pengukuran kesejahteraan yang tertimbang, dan bukan hanya melihat tingkat pendapatan saja. HDI merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah (Todaro,2006).

2.3.1 Pembangunan Manusia

Berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia. Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan.

Pembangunan manusia memiliki cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan PDRB dari pada perbaikan kualitas hidup

manusia. Pembangunan manusia cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input bagi proses produksi.

Dalam perkembangannya, pembangunan manusia mempunyai beberapa elemen-elemen penting, antara lain:

1. Produktifitas

Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang ada.

3. Keberlanjutan

Akses terhadap kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi mendatang. Semua bentuk sumberdaya harus dapat diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukan hanya semata-mata untuk semua orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak anti terhadap pertumbuhan. Dalam perspektif pembangunan manusia pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi adalah alat

untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan manusia. Walaupun demikian, tidak ada hubungan yang otomatis antara pertumbuhan ekonomi dengan kemajuan pembangunan manusia.

2.3.2 Pembangunan Manusia dan Pengukurannya

Indeks Pembangunan Manusia dikembangkan pada tahun 1990 oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub Ul Haq seorang ekonom dari Pakistan. Indeks pembangunan manusia lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan per kapita untuk melihat kemajuan pembangunan yang selama ini digunakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indikator Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai paritas daya beli (BPS, 2010).

Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Indeks kesehatan yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup (AHH) suatu masyarakat mengindikasikan tingginya derajat kesehatan masyarakat tersebut. Untuk menghitung indeks kesehatan digunakan nilai maksimum sebagai batas atas

penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan nilai minimum 25 tahun (standar UNDP).

Komponen yang kedua yaitu Indeks pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis terhadap seluruh penduduk berumur 15 tahun ke atas di suatu daerah. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (standar UNDP). Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun (standar UNDP).

Komponen yang terakhir dalam Indeks Pembangunan Manusia Indeks daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup layak manusia yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan. Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity*) merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk melakukan perbandingan harga-harga riil antar wilayah. Dalam konteks *Purchasing Power Parity* (PPP) di Indonesia, satu rupiah di suatu daerah (Provinsi/Kabupaten) memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Kemampuan daya beli ini lebih mencerminkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, penghitungan daya beli penduduk menggunakan konsumsi per kapita yang telah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan *utilitas marginal* yang dihitung dengan formula Atkinson (BPS, 2010).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu gabungan dari tiga macam indeks dimana indeks tersebut mewakili kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi dimana perhitungannya sebagai berikut :

$$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$$

dimana :

$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup

$X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$ (indeks rata-rata lama sekolah)

$X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak

2.4. Hubungan Antar Variabel

2.4.1. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan

Pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan merupakan alat penting dalam mengurangi dan meningkatkan standard hidup orang banyak. Keadaan yang mungkin bertolak belakang terjadi ketika pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang tinggi tidak menyebabkan hilangnya ketimpangan, malah jurang ketimpangan semakin melebar. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan dengan cepat, membuat kualitas hidup seseorang menjadi menurun, dan akhirnya mengurangi produktifitas ekonomi.

Mapongga (2010) menjelaskan tentang keadaan di Provinsi Gorontalo, tingginya laju pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mengurangi ketimpangan yang ada. Hal ini pula yang terjadi di Gorontalo. Ketika diresmikan menjadi provinsi pada bulan Februari 2001 (dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara), persoalan ketimpangan wilayah, spasial dan sektoral sampai saat ini masih jelas terlihat meskipun laju pertumbuhan ekonominya selama kurun waktu 2001 – 2008 sebesar dua persen di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Laju

pertumbuhan ekonomi ini juga lebih tinggi dibanding beberapa daerah di Kawasan Timur Indonesia.

Dalam Policy Papernya Agussalim (2012) menjelaskan bahwa dari segi persentase penduduk miskin di Sulsel cenderung menurun, yaitu dari 10,29 persen menjadi 10,27 persen (ini akibat total penduduk meningkat lebih cepat ketimbang jumlah penduduk miskin), peningkatan jumlah penduduk miskin secara absolut tetap harus direspon dengan serius. Sedikitnya ada empat alasan mengapa respon semacam itu diperlukan. Pertama, adagium yang terkenal luas di kalangan para ekonomi bahwa “pasang naik air laut akan mengangkat semua perahu” tampaknya tidak sepenuhnya berlaku di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup impresif pada tahun 2010 dan triwulan I-III tahun 2011 ternyata tidak mampu mengangkat taraf hidup semua kelompok penduduk. Taraf hidup kelompok penduduk miskin justru tampak semakin memburuk yang diindikasikan oleh bertambahnya jumlah penduduk miskin.

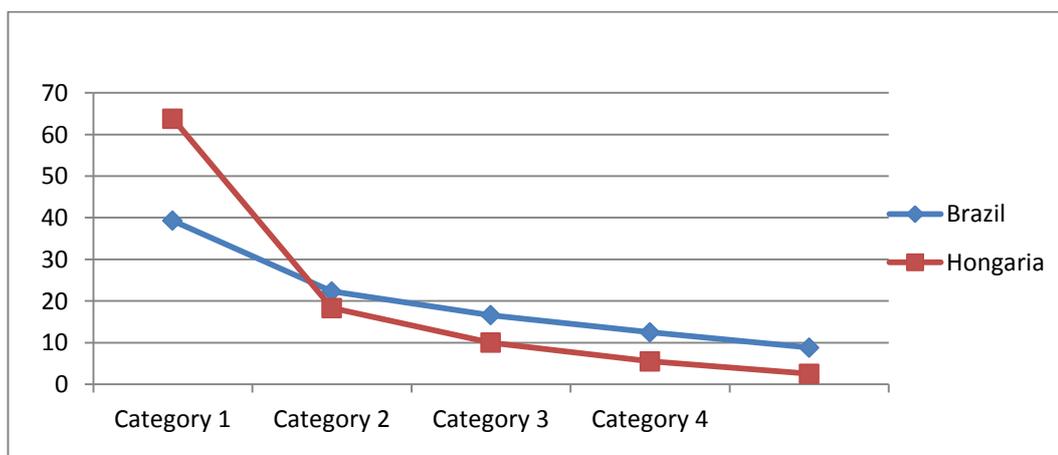
Kedua, jika pertumbuhan ekonomi tidak memberi dampak terhadap penduduk miskin, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok penduduk menengah-atas. Jika pertumbuhan ekonomi lebih bias ke kelompok penduduk kelas menengah-atas ketimbang kelompok penduduk kelas bawah, maka dapat dipastikan bahwa distribusi pendapatan cenderung semakin melebar dan timpang. Angka koefisien gini yang membesar, dari 0,36 pada tahun 2008 menjadi 0,40 pada tahun 2010, sesungguhnya hanya sekedar mengkonfirmasi fakta ini. Di kalangan penduduk miskin, situasi ini berpotensi menimbulkan efek psikologis, dimana mereka selalu menganggap dirinya semakin miskin meskipun secara absolut boleh jadi kehidupan mereka semakin membaik dibandingkan dengan sebelumnya (Agussalim, 2012).

Distribusi pendapatan antar wilayah yang tidak merata dapat menimbulkan ketidak efisiennya perekonomian. Suatu angka yang menunjukkan sebuah peningkatan tidak bisa langsung dijadikan acuan penilaian, dalam bukunya Subottina (2004) juga menjelaskan tentang biaya dan manfaat dari ketimpangan pendapatan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Dalam tulisannya ini di banyak negara yang berpenghasilan relatif rendah, pendapatan dapat dicapai dengan bantuan pembayaran transfer dari anggaran pemerintah. Hal ini menunjukkan betapa ketergantungan suatu wilayah dari apa yang disebut “bantuan” dari anggaran pemerintah yang dialokasikan kepada daerah. Lebih lanjut menjelaskan bahwa pertumbuhan yang tinggi tidak serta merta dapat menjadikan suatu wilayah bebas dari ketimpangan.

Keadaan seperti ini seperti terjadi di Brazil dan Hongaria, kedua negara tersebut mempunyai tingkat GNP perkapita yang tidak terpaut jauh namun Brazil mempunyai tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari Hongaria. Penyumbang GNP di Hongaria lebih merata dibandingkan Penyumbang GNP di Brazil. Hal ini tampak seperti pada gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2

Perbandingan Distribusi GNP pada Brazil dan Hongaria



Sumber: world bank 1996 (dalam Subottina, 2004)

Pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan merupakan alat penting dalam mengurangi dan meningkatkan standard hidup orang banyak. Keadaan yang mungkin bertolak belakang terjadi ketika pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang tinggi tidak menyebabkan hilangnya ketimpangan, malah jurang ketimpangan semakin melebar. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan dengan cepat, membuat kualitas hidup seseorang menjadi menurun, dan akhirnya mengurangi produktifitas ekonomi.

2.4.2 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Sen dalam Pressman (2000) dalam Badrudin (2012), kesejahteraan masyarakat tergantung pada hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dengan baik. Kesejahteraan masyarakat akan maksimum apabila masyarakat dapat makan, membaca, dan menyampaikan hak suaranya. Kemampuan membaca penting bukan karena kepuasannya akan tetapi dengan membaca akan membentuk kepribadian. Makanan penting bukan karena konsumsi akan tetapi makanan dibutuhkan tubuh untuk bisa hidup dan menjadi sehat. Memberikan hak suara penting bukan karena menaikan kepuasan tetapi lebih kepada menghargai sistem politik.

Secara konsisten Indeks Pembangunan Manusia yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik pula akan tetapi bila pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dibarengi dengan pembangunan manusia yang baik maka tidak akan berlangsung lama (sustainable). Agar berjalan positif dan berkelanjutan maka harus didukung oleh kebijakan sosial yang pro pembangunan manusia.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM dapat dijelaskan melalui dua jalur. Jalur pertama adalah

melalui kebijakan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, faktor-faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk subsektor sosial yang meliputi prioritas dalam pendidikan dan kesehatan dasar. Besarnya pengeluaran tersebut mengindikasikan besarnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia.

Pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk dana peningkatan kapasitas pendidikan seperti itu juga dijelaskan oleh Subottina (2004), bahwa pengeluaran tersebut tidak akan sia-sia karena mereka percaya bahwa masyarakat yang lebih berpendidikan akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Dengan peningkatan kapasitas pendidikan maka masyarakat mampu secara cepat menerima inovasi moderen dari perkembangan jaman sehingga produktifitas menjadi bertambah baik.

Selain bidang pendidikan, bidang kesehatan juga mempunyai peran yang cukup penting, kesehatan penduduk suatu negara seringkali diukur dengan menggunakan indikator-indikator statistik yaitu harapan hidup dan tingkat kematian bayi. Indikator ini mengindikasikan kualitas hidup penduduk karena secara tidak langsung mencerminkan banyak aspek kesejahteraan masyarakat termasuk tingkat pendapatan dan gizi, kualitas lingkungan, dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Hal ini juga tercermin dari pengeluaran yang dilakukakn oleh negara berpenghasilan rendah dan tinggi, Subottina (2004) yang menjelaskan bahwa hanya 1 persen dari PDB jumlah yang dikeluarkan oleh negara berpenghasilan rendah berbanding 6 persen dari PDB jumlah yang dikeluarkan oleh negara yang berpenghasilan tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jalur kedua adalah melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga. Dalam hal ini, faktor yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar seperti pemenuhan nutrisi anggota keluarganya, biaya pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar, serta untuk kegiatan lain yang serupa. Selain pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumah tangga, hubungan antara kedua variabel itu berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ini sangat penting dan merupakan “jembatan” yang mengkaitkan antara keduanya (Soebeno, 2006).

Ketika tingkat pendapatan akibat dari pertumbuhan ekonomi yang rendah, menyebabkan pengeluaran rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia menjadi turun. Begitu juga sebaliknya, tingkat pendapatan yang relatif tinggi cenderung lebih meningkatkan belanja rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi belanja rumah tangga untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan nutrisi, terutama pada rumah tangga miskin.

2.4.3 Hubungan Antara Ketimpangan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya menjadi suatu keberhasilan pemerintahan suatu daerah, tetapi juga menjadi keberhasilan pembangunan daerah. Hal ini akan berdampak positif apabila dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak hanya mengejar kepentingan sesaat. Proses pembangunan yang dibarengi dengan perbaikan sumber daya yang ada, akan menjadikan pembangunan tersebut berkelanjutan. Seperti diketahui manusia sebagai motor penggerak utama pembangunan sangat berperan

penting dalam proses pembangunan. Keadaan suatu daerah dengan daerah lainnya juga menjadi sangat berpengaruh. Suatu daerah mungkin akan membutuhkan dukungan daerah disekitarnya untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan terjadi di provinsi dan kabupaten/kota yang baru diantaranya adalah kesenjangan struktural akibat aktivitas perekonomian yang terlalu bertumpu pada sektor-sektor tertentu (biasanya sektor primer; pertanian tradisional), keterbatasan sumber daya yang berimplikasi pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berdampak pada indeks pembangunan manusia serta jumlah dan kualitas infrastruktur yang buruk karena tidak ditunjang oleh alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan dan pemeliharaan. Pembangunan secara umum dapat diupayakan melalui kenaikan laju pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain tingginya laju pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada perbaikan kesejahteraan dan perekonomian secara keseluruhan (Mapongga, 2010).

Ketimpangan juga mempengaruhi kesejahteraan baik positif maupun negatif seperti yang dijelaskan oleh Subottina (2004), ketimpangan yang tinggi mengurangi golongan orang dengan akses kepada beberapa hal seperti tanah dan pendidikan sehingga mengurangi produktifitas yang selanjutnya akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi juga mengancam stabilitas sosial ekonomi masyarakat karena semakin banyak orang yang tidak puas dengan status ekonomi mereka, yang membuat sulitnya tercapai kesepakatan politik antar kelompok dengan penghasilan yang tinggi terhadap kelompok yang berpenghasilan rendah. Ketidak stabilan politik yang disebabkan oleh ketimpangan ini selanjutnya akan meningkatkan resiko investasi yang

selanjutnya mempengaruhi tingkat pendapatan sehingga akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat menjadi terhambat.

Pengaruh positif ketimpangan terhadap kesejahteraan juga dijelaskan oleh Todaro (2006), dimana ada korelasi positif antara tingkat pendidikan seseorang dengan penghasilannya seumur hidup. Korelasi ini dapat dilihat terhadap lulusan sekolah tingkat atas (sekolah menengah atas dan universitas) dimana pendapatan mereka beberapa ratus persen lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya lulus sekolah dasar atau kurang dari itu. Hal ini disebabkan karena tingkat penghasilan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jelas ketimpangan pendapatan akan bertambah buruk mengingat para pelajar yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan tinggi jauh lebih besar peluangnya untuk meneruskan pendidikannya sampai ke jenjang yang tertinggi. Dengan demikian, sistem pendidikan yang ada di negara berkembang sesungguhnya justru cenderung mempertahankan atau malah justru memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan di negara tersebut.

Untuk meningkatkan kesejahteraan yang diukur dengan IPM dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi sebagai syarat perlu dan pemerataan pembangunan sebagai syarat cukup karena dengan pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan (Badrudin, 2012).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian Munawwarah (2009) tentang Pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan Distribusi Pendapatan Kabupaten Luwu Periode 1991-2000 memperoleh hasil bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pembangunan terhadap distribusi pendapatan di Kabupaten Luwu memperlihatkan tanda positif dan signifikan. Hal ini berarti jika

pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah meningkat maka akan berpengaruh terhadap membaiknya distribusi pendapatan di Kabupaten Luwu.

Penelitian Mapongga (2010) secara simultan dan parsial, perbedaan pada PDRB perkapita, Indeks Pembangunan Manusia dan Rasio Belanja Infrastruktur signifikan sebagai sumber utama ketimpangan. Secara deskriptif, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan ketimpangan pembangunan. Artinya secara vertikal pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan ketimpangan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bisa dicapai dengan meningkatkan PDRB perkapita diikuti oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kemudahan dalam mengakses infrastruktur.

Berdasarkan analisis penelitian Sasana (2009) tentang pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar daerah serta penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Kesenjangan ekonomi antar daerah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian Puspendika (2007) tentang ketimpangan pembangunan di era otonomi, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan di Indonesia memperoleh hasil bahwa bahwa nilai indeks ketimpangan pendapatan antar propinsi di Indonesia berada pada tingkat yang tinggi. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembangunan manusia adalah pengeluaran riil perkapita sedangkan PDRB perkapita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan manusia. Antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan

manusia tidak terdapat hubungan kausalitas, tetapi korelasi antara keduanya bersifat positif.

Sudarmono (2006) melakukan penelitian tentang analisis transformasi struktural, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan antar daerah di wilayah pembangunan I Jawa Tengah. Dari hasil analisis yang dilakukan ternyata menunjukkan di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah pada periode penelitian menunjukkan fakta bahwa terjadi ketimpangan atas distribusi pendapatan yang semakin meningkat. Hal ini memberikan suatu implikasi kebijakan bahwa Pemerintah khususnya propinsi Jawa Tengah harus mencari suatu cara agar pemerataan pendapatan diusahakan menjadi semakin merata. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah pembangunan I Jawa Tengah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan memberdayakan sektor yang menjadi sektor unggulan di masing-masing wilayah. Kerjasama antar Kabupaten/Kota di Wilayah Pembangunan Jawa Tengah diharapkan akan dapat mengembangkan diri masing-masing Kabupaten/Kota namun kenyataannya justru dinilai stagnan dan tidak menunjukkan kemajuan. Hal ini terjadi karena kerjasama tersebut tidak didasari dengan kesukarelaan sehingga bisa berlanjut melainkan cenderung mengedepankan ego kewilayahan.

Penelitian Retnosari (2006) tentang pengaruh distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat menjelaskan bahwa laju pertumbuhan PDRB yang tinggi ternyata tidak selalu berkaitan dengan perbaikan distribusi pendapatan. Pembangunan memerlukan PDRB yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat, tetapi masalah dasarnya bukan hanya bagaimana menumbuhkan PDRD, tetapi juga siapakah yang akan menumbuhkan PDRB, sejumlah besar masyarakat yang ada di dalam suatu daerah ataukah hanya

segelintir orang. Jika yang menumbuhkannya hanyalah orang-orang kaya yang berjumlah sedikit, maka manfaat pertumbuhan PDRB itu pun hanya akan dinikmati oleh mereka saja, sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah. Namun jika pertumbuhan dihasilkan oleh seluruh masyarakat, mereka pulalah yang akan memperoleh manfaat terbesar dan buah pertumbuhan ekonomi akan terbagi secara lebih merata. Oleh karena itu distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu daerah dikalangan penduduknya. Dari temuan empiris yang didapatkan dalam penelitian ini terlihat adanya trade off antara pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin tinggi ketimpangan distribusi pendapatan maka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat semakin meningkat, dan sebaliknya semakin rendah distribusi pendapatan maka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat semakin rendah.

Penelitian R.Abdul Maqin (2006) tentang analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia di Jawa Barat periode 1993-2003. Hubungan secara simultanitas antara pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia di Jawa Barat Hasil penelitiannya adalah pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah untuk bidang sosial, distribusi pendapatan, tingkat pendaftaran sekolah dasar penduduk wanita, keterbukaan daerah dan krisis ekonomi mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia, terjadi hubungan kausalitas dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di Jawa Barat.

Ilham Irawan (2009) melakukan penelitian tentang "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia" terdiri dari IPM sebagai variabel terikatnya, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari pertumbuhan ekonomi dalam hal ini PDB, anggaran pengeluaran pemerintah,

penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Hasil dari penelitian ini adalah tiga dari empat variabel memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, yaitu PDB, anggaran pengeluaran pemerintah, penanaman modal asing, dan variabel lainnya yaitu penanaman modal dalam negeri tidak signifikan tetapi memberikan pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

2.6. Kerangka Pemikiran

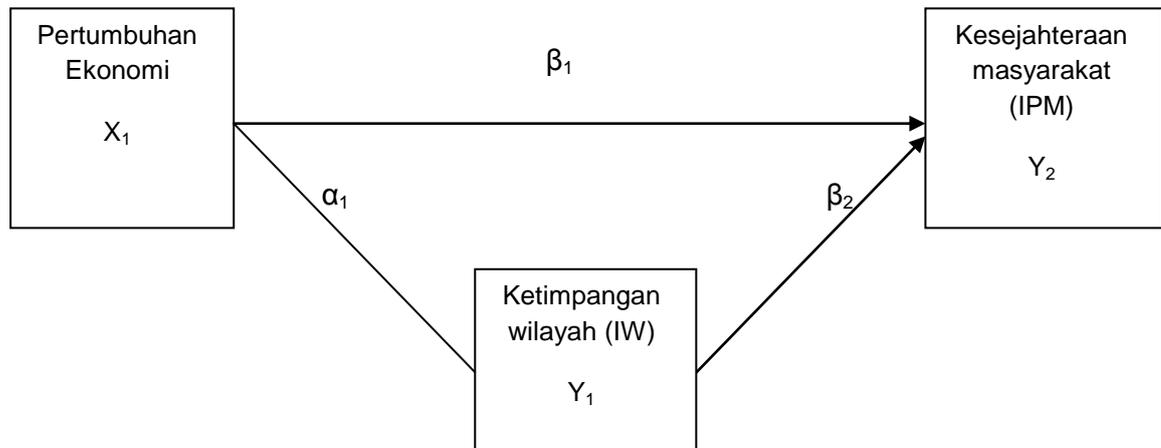
Pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan merupakan alat penting dalam mengurangi dan meningkatkan standard hidup orang banyak. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mengurangi ketimpangan yang ada. Distribusi pendapatan antar wilayah yang tidak merata dapat menimbulkan tidak efisiennya perekonomian. Pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan merupakan alat penting dalam mengurangi dan meningkatkan standard hidup orang banyak. Keadaan yang mungkin bertolak belakang terjadi ketika pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang tinggi tidak menyebabkan hilangnya ketimpangan, malah jurang ketimpangan semakin melebar. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan dengan cepat, membuat kualitas hidup seseorang menjadi menurun, dan akhirnya mengurangi produktifitas ekonomi (Subottina, 2004).

Indeks Pembangunan Manusia yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik pula akan tetapi bila pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dibarengi dengan pembangunan manusia yang baik maka tidak akan berlangsung lama (sustainable). Hal ini dapat dijelaskan melalui dua jalur yaitu pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumah tangga. Seperti yang dijelaskan oleh Subeno (2006) dan Subottina (2004) dimana pengeluaran pemerintah tidak akan sia-sia karena hal tersebut akan berkontribusi pada peningkatan kapasitas

masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas pendidikan maka masyarakat mampu secara cepat menerima inovasi moderen dari perkembangan jaman sehingga produktifitas menjadi bertambah baik. Sementara besarnya dan komposisi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar seperti pemenuhan nutrisi anggota keluarganya, biaya pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar, serta untuk kegiatan lain akan membuat tingkat produktifitas bertambah. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi belanja rumah tangga untuk kebutuhan dasar, hubungan antara kedua variabel itu berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. (Soebeno, 2006).

Proses pembangunan yang dibarengi dengan perbaikan sumber daya yang ada, akan menjadikan pembangunan tersebut berkelanjutan. Mapongga (2010) dan Subottina (2004) serta Sjafrizal (2008) menjelaskan bahwa suatu daerah mungkin akan membutuhkan dukungan daerah disekitarnya untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. ketimpangan yang tinggi mengurangi golongan orang dengan akses kepada beberapa hal dasar seperti tanah dan pendidikan sehingga mengurangi produktifitas yang selanjutnya akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi juga mengancam stabilitas sosial ekonomi masyarakat karena semakin banyak orang yang tidak puas dengan status ekonomi mereka, yang membuat sulitnya tercapai kesepakatan politik antar kelompok dengan penghasilan yang tinggi terhadap kelompok yang berpenghasilan rendah. Ketidak stabilan politik yang disebabkan oleh ketimpangan ini selanjutnya akan meningkatkan resiko investasi yang selanjutnya mempengaruhi tingkat pendapatan sehingga akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat menjadi terhambat.

Pengaruh antara Pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah dan kesejahteraan sebagai berikut :

Gambar 2.3 Kerangka Pikir

2.7. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang ada diarahkan untuk merujuk pada dugaan sementara yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah di Sulawesi Selatan.
2. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui ketimpangan wilayah di Sulawesi Selatan
3. Ketimpangan wilayah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Makassar dan data penelitian diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan. Penetapan daerah penelitian ini didasarkan pada pertimbangan untuk memudahkan penulis mengumpulkan data yang diperlukan, serta waktu, biaya dan tenaga dapat dihemat seefisien mungkin.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk "*time series*" maupun "*cross section*" yang bersumber dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, serta dari berbagai literatur dan artikel yang dimuat di media massa, baik cetak maupun elektronik yang relevan dengan pokok penelitian yang terdiri dari data Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Williamson, dan Indeks Pembangunan Manusia. Adapun data yang diambil adalah data menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 21 Kabupaten dan 3 Kota pada periode tahun 2007-2011.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur-literatur dan penerbitan seperti jurnal, artikel, majalah dan internet yang berhubungan dan mendukung penelitian ini.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan dan pembangunan manusia

adalah model ekonometrika dengan meregresikan variabel-variabel yang ada dengan menggunakan metode 2SLS (dua tahap) yang menggambarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi (X) sebagai variabel independen terhadap variabel dependen pembangunan manusia (Y_2) melalui variabel perantara yakni ketimpangan (Y_1) dan. data-data yang digunakan, dianalisis secara dengan menggunakan analisis statistik yaitu estimasi model regresi linear berganda dengan panel data.

Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara data *time series* dan data *cross section* yang dapat dinyatakan pada persamaan sebagai berikut:

$$Y_1 = f(X) \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = f(Y_1, X) \dots \dots \dots (2)$$

Adapun persamaan linearnya adalah sebagai berikut :

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X + \mu_1 \dots \dots \dots (3)$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 Y_1 + \mu_2 \dots \dots \dots (4)$$

Adapun persamaan panelnya adalah sebagai berikut :

$$Y_{1it} = \alpha_0 + \alpha_1 X_{it} + \mu_1 \dots \dots \dots (5)$$

$$Y_{2it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 Y_{1it} + \mu_2 \dots \dots \dots (6)$$

Dimana:

X_1 = Pertumbuhan Ekonomi

Y_1 = Ketimpangan Wilayah

Y_2 = Pembangunan Manusia

i = Kabupaten/Kota

t = Tahun

α_0 dan β_0 = *Konstanta*

$\alpha_1, \beta_1,$ dan β_2 = *Parameter yang akan diestimasi*

μ_1 dan $\mu_2 = \text{Kesalahan random}$

3.5 Uji Statistik

3.5.1. Uji Koefisien Determinasi (R-square)

Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan jika diterapkan dalam masalah yang berbeda. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodnes of fit*) digunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 2003).

3.5.2. Uji F (F-test)

Uji F-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

H_0 diterima ($F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$) artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

H_a diterima ($f\text{-hitung} > F\text{-tabel}$) artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

3.5.3. Uji T (T-test)

Uji t-statistik merupakan suatu pengujian secara parsial yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Dalam uji ini, digunakan hipotesis sebagai berikut:

H_0 diterima ($t\text{-statistik} < t\text{-tabel}$) artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Ha diterima ($t\text{-statistik} > t\text{-tabel}$) artinya variabel independen secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan *construct* atau konsep yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel independent

Variabel independent dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi (X).

2. Variabel dependent

Variabel dependent dalam penelitian ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Y_2).

3. Variabel perantara

Variabel perantara dalam penelitian ini yaitu ketimpangan wilayah (Y_1)

Langkah berikutnya setelah menspesifikasi variabel-variabel penelitian adalah melakukan pendefinisian secara operasional. Hal ini bertujuan agar variabel penelitian yang telah ditetapkan dapat dioperasionalkan, sehingga memberikan petunjuk tentang bagian suatu variabel dapat diukur.

- a. Pertumbuhan Ekonomi (X_1) adalah persentase kenaikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Data yang digunakan adalah data pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dinyatakan dalam satuan persen (%).
- b. Ketimpangan wilayah (Y_1) adalah perbedaan pendapatan antar daerah di Sulawesi Selatan. Pengukuran yang dipakai untuk mengukur

ketimpangan wilayah adalah Indeks Williamson Sulawesi Selatan dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

- c. Kesejahteraan masyarakat (Y_2) adalah kondisi dimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan adalah data Indeks Pembangunan Manusia menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dinyatakan dalam satuan persen (%).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pusat pengembangan dan pelayanan pembangunan di wilayah Kawasan Timur Indonesia terletak antara $0^{\circ}12'$ – 8° lintang selatan dan $116^{\circ}48'$ – $122^{\circ}36'$ bujur timur, beribukota di Makassar dan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah Utara, Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Timur, Laut Flores di sebelah Selatan dan Selat Makassar di sebelah Barat.

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan $46.717,48 \text{ km}^2$. Secara administrasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 20 Kabupaten dan 3 kota hingga tahun 2008, sedangkan untuk 2009 terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 kota dengan Kabupaten Toraja Utara yang terjadi pemekaran di tahun 2010 yang terdiri dari 303 kecamatan dan 2677 Desa/Kelurahan.

Jumlah sungai yang mengalir wilayah Sulawesi Selatan tercatat sekitar 67 aliran sungai, dengan jumlah aliran terbesar di Kabupaten Luwu, yakni 25 aliran sungai. Di Sulawesi Selatan terdapat empat danau yakni Danau Tempe dan Sidenreng yang berada di Kabupaten Wajo, serta danau Matana dan Towuti yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur. Adapun jumlah gunung tercatat sebanyak 7 gunung, dengan gunung tertinggi adalah Gunung Rantemario dengan ketinggian 3 470 m di atas permukaan air laut. Gunung ini berdiri tegak di perbatasan Kabupaten Enrekang dan Luwu.

Letak yang strategis ini membuat Sulawesi Selatan menjadi pintu gerbang utama menuju Kawasan Timur Indonesia (KTI). Wilayah yang berada di ujung

pulau Sulawesi ini mempunyai satu pelabuhan bertaraf internasional yang berperan dalam distribusi kebutuhan barang dan jasa bagi KTI, serta bandar udara bertaraf internasional serta pangkalan militer bagi pertahanan negara di kawasan timur Indonesia.

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan menjadikan daerah ini sebagai penyedia bahan baku bagi industri baik di dalam dan luar negeri. Keadaan alam ini menjadi modal penting dalam pembangunan di daerah tersebut, apalagi Sulawesi Selatan berada pada jalur persimpangan dan menjadi pintu gerbang bagi Indonesia timur sehingga berpengaruh terhadap kinerja pembangunan setiap daerah yang kemudian menjadikan daerah tersebut mampu berkembang dengan baik atau malah menjadi daerah yang semakin tertinggal.

4.1.2 Kondisi Demografis

Penduduk merupakan salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan data BPS, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 berjumlah 8.115.638 jiwa yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kota Makassar dengan jumlah 1.352.136 jiwa.

Kepadatan penduduk daerah perkotaan merupakan konsekuensi logis dari tingginya aktivitas perekonomian di sana. Oleh karena itu, meskipun luas wilayah perkotaan relatif jauh lebih sempit dibandingkan wilayah Kabupaten, namun jumlah penduduknya relatif lebih banyak, sehingga kepadatan pendudukpun semakin tinggi. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu daerah, karena jumlah penduduk dapat menjadi input ataupun pasar bagi aktifitas perekonomian suatu daerah. Oleh

karena itu jumlah penduduk bisa menjadi suatu hal yang menguntungkan maupun merugikan, tergantung dari mana menilainya.

Tabel 4.1

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2011

Kabupaten/Kota	Luas Daerah	Jumlah Penduduk	Kepadatan
Kepulauan Selayar	903,50	123283	136
Bulukumba	1 154,67	398 531	345
Bantaeng	395,83	178 477	451
Jeneponto	903,35	346 149	383
Takalar	566,51	272 316	481
Gowa	1 883,32	659 512	350
Sinjai	819,96	231 182	282
Maros	1 619,12	322 212	199
Pangkep	1 112,29	308 814	278
Barru	1 174,71	167 653	143
Bone	4 559,00	724 905	159
Soppeng	1 359,44	226 079	166
Wajo	2 506,20	388 985	155
Sidrap	1 883,25	274 648	146
Pinrang	1 961,17	354 652	181
Enrekang	1 786,01	192 163	108
Luwu	3 000,25	335 828	112
Tana Toraja	2 054,30	223 306	109
Luwu Utara	7 502,68	290 365	39
Luwu Timur	6 944,88	245 515	35
Toraja Utara	1 151,47	218 943	190
Makassar	175,77	1 352 136	7693
Pare Pare	99,33	130 563	1314
Palopo	247,52	149 421	604
Sulawesi Selatan	45 764,53	8 115 638	177

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2012

Makassar dengan jumlah penduduk tertinggi di Sulawesi Selatan yang berjumlah 1.352.136 jiwa, memiliki luas wilayah 175,77Km², dengan kepadatan penduduk mencapai 7.693Jiwa/Km² dan menjadi daerah dengan perekonomian termaju di Sulawesi Selatan mempunyai andil yang besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini, hal ini disebabkan oleh daya tarik yang dimiliki oleh Makassar sehingga banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk mencari peruntungan di kota ini. Tidak cukup itu saja, para pemilik modal juga lebih memilih Makassar sebagai tempat investasinya.

Pare Pare dan Palopo yang selanjutnya menjadi daerah dengan luas wilayah tersempit dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lain dan Sulawesi Selatan, menjadi pusat pertumbuhan yang mampu menarik modal manusia dari daerah disekitarnya. Hal ini berbanding terbalik dengan daerah yang memiliki luas wilayah yang jauh lebih besar, misalnya, Selayar, Bone, Tanah Toraja, Wajo, Luwu, dan daerah lainnya yang menjadi sumber bahan baku bagi daerah yang lebih maju tersebut dan mempunyai kepadatan penduduk dibawah kota lainnya sehingga terjadi perpindahan modal, salah satunya adalah tenaga yang mempunyai ketrampilan yang kemudian berkontribusi terhadap pembangunan dan selanjutnya menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah di Sulawesi Selatan.

4.2 Perkembangan Variabel Penelitian

4.2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011

Salah satu indikator dalam kemajuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah yang dihasilkan pada satu tahun tertentu dibandingkan

dengan nilai tahun sebelumnya. PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Salah satu indikator yang menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu (satu tahun) adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel 4.2 dibawah menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2007 hingga 2011 mengalami peningkatan yang dialami oleh hampir semua Kabupaten/Kota yang ada. Data diatas dapat kita lihat pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai oleh daerah yang bersetatus sebagai Kota Madya mengalami pertumbuhan yang tinggi, diatas kabupaten lain yang berada di Sulawesi Selatan. Daerah itu adalah Kota Makassar yang pertumbuhannya dalam lima tahun terakhir berada diatas angka delapan. Pare-Pare yang rata-rata berada di angka tujuh dalam lima tahun terakhir pertumbuhan ekonominya, dan Kota Palopo yang mempunyai pertumbuhan ekonomi 8,16 persen di tahun 2011.

Kabupaten Jeneponto yang selama ini dikenal sebagai daerah yang masih tertinggal di Sulawesi Selatan pada tahun 2007 mempunyai pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 4,06 persen, kemudian pada tahun 2009 naik menjadi 5,38 persen, dan terakhir pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibanding lima tahun sebelumnya yaitu berada pada angka 7,32 persen. Pada tahun 2007 juga Jeneponto menjadi daerah yang paling rendah pertumbuhan ekonominya di Sulawesi Selatan.

Tabel 4.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 2007-2011

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
Selayar	6,45	7,27	7,89	8,01	8,52
Bulukumba	5,36	8,06	6,47	6,27	6,38
Bantaeng	5,37	6,73	7,36	7,9	8,43
Jeneponto	4,06	5,78	5,38	7,25	7,32
Takalar	6,04	6,19	6,58	6,85	7,34
Gowa	6,19	6,92	7,99	6,05	6,2
Sinjai	5,43	7,45	7,02	6,03	5,9
Maros	4,58	5,61	6,27	7,03	7,57
Pangkep	6,12	7,16	5,91	6,34	9,17
Barru	4,94	6,98	5,72	6,01	7,41
Bone	6,01	7,24	7,54	7,63	6,2
Soppeng	5,37	7,76	6,81	4,45	7,59
Wajo	5,87	7,4	5,1	5,71	10,93
Sidrap	5,46	8,23	6,66	4,45	11,82
Pinrang	5,14	6,73	7,65	6,23	7,12
Enrekang	5,11	6,49	6,62	5	6,9
Luwu	5,53	5,73	6,82	6,95	7,47
Tana Toraja	5,35	7,18	6,1	6,27	7,88
Luwu Utara	6,83	9,65	6,9	5,93	7,29
Luwu Timur	5,75	5,17	7,74	5,5	8,34
Toraja Utara			5,74	7	7,9
Makassar	8,11	10,52	9,2	9,83	9,65
Pare Pare	6,98	7,56	7,93	8,47	7,79
Palopo	6,53	7,44	7,56	8,29	8,16
Sulsel	6,34	7,78	6,23	8,18	7,65

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, DDA Luwu Timur 2012

Pertumbuhan ekonomi terendah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 dialami oleh Kab Luwu Timur yang mempunyai pertumbuhan sebesar 5,17 persen, tahun 2009 adalah Kab Wajo dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen, tahun 2010 Kab Soppeng menjadi yang terendah dengan 4,45 persen, dan di tahun 2011 Kab Sinjai yang menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Sulawesi Selatan sebesar 5,9 persen.

Kota Makassar dengan kemajuan infrastrukturnya dan ditopang dengan kemajuan di bidang lainnya dibandingkan dengan daerah sekitarnya menjadi Kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan selama empat tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2007 sampai 2010 dengan pertumbuhan 8,11 persen tahun 2007, 10,52 persen tahun 2008, 9,2 persen tahun 2009, dan 9,83 persen di tahun 2010. Sedangkan di tahun 2011 Kab Sidrap yang menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 11,82 persen.

Selama kurun waktu 2007 sampai dengan 2008 terdapat sekitar lima Kabupaten/Kota yang mempunyai pertumbuhan ekonomi berada di bawah pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan, pada tahun 2009 terjadi peningkatan daerah yang memiliki pertumbuhan diatas Sulawesi Selatan yang berada pada angka 6,23 persen dan berkurang secara drastis pada tahun 2010 dimana Sulawesi Selatan mampu mencapai pertumbuhan pada angka 8,18 persen. Tahun 2011 terdapat sebelas Kabupaten/Kota yang mempunyai pertumbuhan di atas Sulawesi Selatan.

Pertumbuhan ekonomi yang dimiliki oleh tiga kota yang berada di Sulawesi Selatan hampir selalu berada di atas Sulawesi Selatan, kecuali pada tahun 2008 dimana Pare Pare dan Palopo berada di bawah Sulawesi Selatan. Pada tahun 2009 terdapat hal menarik dimana banyak daerah yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi diatas yang dicapai Sulawesi Selatan, akan tetapi menurun di tahun 2010 dan kembali naik lagi di tahun 2011.

Daerah yang dalam kurun 2007 sampai 2011 mempunyai pertumbuhan selalu di bawah Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Barru dengan rata rata pertumbuhan sebesar 5,96 untuk Jeneponto dan 6,12

untuk Barru. Sementara daerah seperti Pangkep, Wajo, dan Sidrap mempunyai lonjakan yang cukup tinggi dalam pertumbuhan ekonominya sehingga pada tahun 2011 mampu berada diatas Sulawesi Selatan.

4.2.2 Perkembangan Indeks Williamson pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2007-2011

Ketimpangan pembangunan memang merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dan komponen masyarakat. Setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola potensi daerah yang dimilikinya secara tepat sehingga akan mendorong terciptanya proses pembangunan dengan tingkat pemerataan yang baik dan disertai pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Dengan demikian ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya serta pendapatan antar golongan ataupun daerah akan semakin menurun. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk bisa mengembangkan perekonomian daerahnya, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Indeks Williamson merupakan suatu alat pengukuran yang digunakan untuk mengetahui ketimpangan suatu wilayah. Indeks ini akan menunjukkan seberapa timpang Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, penggunaan indeks ini akan membantu menjelaskan apakah ada perubahan atau tidak dalam ketimpangan pembangunan.

Variabel-variabel yang digunakan dalam Indeks Williamson adalah PDRB, yang diformulasikan dengan jumlah penduduk. Keadaan PDRB di Sulawesi Selatan akan mencerminkan keadaan perekonomian daerah yang bersangkutan. Pendapatan daerah atau wilayah yang tinggi secara relatif baik, demikian juga sebaliknya bila pendapatan daerah/wilayahnya rendah maka dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian daerah tersebut relatif kurang baik. Nilai koefisien

indeks williamson adalah 0 sampai 1, yang berarti semakin mendekati 0 berarti ketimpangan semakin rendah dan bila angka semakin mendekati 1, hal ini berarti ketimpangan semakin tinggi.

Sulawesi Selatan sendiri mempunyai dua puluh satu Kabupaten dan tiga Kota Madya, hal ini membuat daerah ini menjadi rawan terjadi ketimpangan. Dari setiap kabupaten/kota tersebut, masing-masing mempunyai keunggulan sumber daya sendiri, sehingga mempengaruhi kemampuan daerah tersebut untuk berkembang.

Tabel 4.3

Indeks Williamson Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 2007-2011

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
Selayar	0,051	0,046	0,042	0,040	0,039
Bulukumba	0,057	0,055	0,050	0,048	0,049
Bantaeng	0,049	0,043	0,038	0,037	0,035
Jeneponto	0,124	0,113	0,110	0,111	0,111
Takalar	0,080	0,073	0,069	0,073	0,073
Gowa	0,015	0,134	0,128	0,138	0,139
Sinjai	0,039	0,033	0,027	0,026	0,028
Maros	0,078	0,071	0,067	0,071	0,070
Pangkep	0,088	0,087	0,097	0,090	0,096
Barru	0,039	0,034	0,031	0,032	0,031
Bone	0,887	0,075	0,065	0,061	0,063
Soppeng	0,024	0,017	0,011	0,007	0,005
Wajo	0,019	0,010	0,030	0,028	0,038
Sidrap	0,001	0,008	0,015	0,001	0,008
Pinrang	0,045	0,046	0,027	0,059	0,059
Enrekang	0,055	0,050	0,046	0,046	0,046
Luwu	0,030	0,026	0,020	0,020	0,030
Tana Toraja	0,134	0,123	0,090	0,077	0,077
Luwu Utara	0,043	0,035	0,032	0,010	0,009
Luwu Timur	0,223	0,459	0,407	0,452	0,378
Toraja Utara	0,000	0,000	0,081	0,072	0,071
Makassar	0,132	0,436	0,472	0,471	0,494
Pare Pare	0,005	0,009	0,014	0,028	0,008
Palopo	0,010	0,013	0,014	0,015	0,017

Sumber : BPS Sulawesi Selatan 2012

Tabel 4.3 di atas dapat kita lihat bagaimana ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2007 sampai 2011, sebagian besar Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi dalam ketimpangan wilayahnya. Hal ini juga terjadi pada PDRB masing-masing Kabupaten/Kota yang juga mengalami fluktuasi pada periode yang sama, dimana PDRB merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Williamson.

Daerah yang selama ini terkenal mempunyai pendapatan yang tinggi ternyata indeks williamsonnya termasuk pada posisi daerah yang timpang. Hal ini dapat dilihat pada Kota Makassar dan Kabupaten Luwu Timur dengan indeks williamson sebesar 0,494 untuk Makassar dan 0,378 untuk Luwu Timur pada tahun 2011, kedua daerah tersebut selama ini dikenal sebagai penyumbang PDRB terbesar di Sulawesi Selatan. Sementara itu daerah seperti Selayar, Maros, dan Soppeng yang lebih rendah kontribusi PDRB terhadap Sulawesi Selatan mempunyai indeks williamson yang lebih bagik dibanding dua daerah diatas.

4.2.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2007-2011

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya menjadi suatu keberhasilan pemerintahan suatu daerah saja, tetapi juga menjadi keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Hal ini akan berdampak positif apabila dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak hanya mengejar kepentingan sesaat saja. Proses pembangunan yang dibarengi dengan perbaikan sumber daya yang ada, akan menjadikan pembangunan tersebut berkelanjutan. Seperti diketahui manusia sebagai motor penggerak utama pembangunan sangat berperan penting dalam proses pembangunan. Keadaan suatu daerah dengan daerah lainnya juga menjadi sangat berpengaruh

Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari setandar kehidupan masyarakat, dimana telah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Tabel 4.4
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
di Sulawesi Selatan 2007-2011

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
Selayar	67,74	68,23	68,86	69,34	70
Bulukumba	69,27	69,87	70,75	71,19	71,77
Bantaeng	68,33	68,87	69,4	70,1	70,66
Jeneponto	63,42	64,04	64,54	64,92	65,27
Takalar	66,95	67,49	68,04	68,62	69,09
Gowa	68,87	69,37	70	70,67	71,29
Sinjai	68,24	68,74	69,07	69,53	70,16
Maros	69,22	69,85	70,3	71,12	71,74
Pangkep	67,73	68,3	69,63	69,43	69,89
Barru	68,97	69,54	71,26	70,86	71,19
Bone	68,34	68,96	69,44	70,17	70,77
Soppeng	70,26	70,76	72,06	71,89	72,23
Wajo	68,04	68,72	72,61	70,22	71,04
Sidrap	71,18	71,74	74,19	72,37	72,74
Pinrang	71,91	71,91	73,59	73,21	73,8
Enrekang	73,32	73,76	71,39	74,55	74,84
Luwu	72,46	72,96	73,65	73,98	74,42
Tana Toraja	70,18	70,81	71,39	71,84	72,29
Luwu Utara	72,55	73,15	73,65	74,32	74,69
Luwu Timur	71,67	71,73	72,29	72,79	73,11
Toraja Utara		68,41	68,92	69,56	70,15
Makassar	77,33	77,92	78,24	78,79	79,11
Pare Pare	76,47	76,97	77,45	77,78	78,19
Palopo	75,37	75,8	76,11	76,55	76,85
Sulsel	69,62	70,22	70,94	71,62	71,98

Sumber : BPS Sulawesi Selatan 2012

United Nations Development Programme (*UNDP*) mulai tahun 1990 telah menyusun suatu indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Indikator kesejahteraan masyarakat yang disusun oleh UNDP dikenal dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dari tahun 2007 hingga 2011, rata-rata nilai indeks pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan secara konsisten terus meningkat. Peningkatan tersebut relatif hampir sama tiap tahunnya yaitu meningkat sekitar 0,5%, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2009. Pada tahun 2008 nilainya mengalami peningkatan sebesar (0.50%), kemudian di tahun 2009 meningkat (0.72%), tahun 2010 meningkat sebesar (0.68%), dan di tahun 2011 meningkat sebesar (0.36%). Secara umum, kenaikan angka IPM diharapkan mampu mewakili peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga menghasilkan manusia (SDM) yang produktif, yaitu tenaga manusia yang sehat, berpendidikan dan terampil khususnya pada kalangan bawah.

Dalam kurun waktu lima tahun antara tahun 2007 sampai 2011, Kabupaten yang menunjukkan kinerja yang baik adalah kabupaten Wajo dan Bulukumba. Kabupaten Wajo mampu menaikkan nilai IPM nya sebesar 2,99 poin dari 68,05 pada tahun 2007 menjadi 71,04 pada tahun 2011. Adapun IPM kabupaten Bulukumba naik sebesar 2,36 poin dari 68,3 pada tahun 2007 menjadi 70,66 pada tahun 2011 walaupun masih dibawah rata-rata IPM Sulawesi Selatan. Sedangkan Kabupaten yang nilai IPM nya terendah adalah Kabupaten Jeneponto yang dalam kurun waktu 2007-2011 hanya menaikkan nilai IPM sebesar 1,87 poin dari 63,4 pada tahun 2007 menjadi 65,27 pada tahun 2011.

Tabel 4.5
Indeks Komposit IPM Kabupaten/Kota
di Sulawesi Selatan 2007 dan 2011

Kab/Kota	Angka Melek Huruf (%)		Rata-Rata Lama Sekolah (th)		Angka Harapan Hidup (th)		Daya Beli (PPP, ribu rp)	
	2007	2011	2007	2011	2007	2011	2007	2011
Selayar	88,99	90,17	6,62	7,06	67,33	67,88	613,73	629,50
Bulukumba	85,20	85,42	6,45	7,11	71,02	72,13	619,60	636,76
Bantaeng	76,58	78,98	5,80	6,10	72,38	73,96	628,60	636,94
Jeneponto	75,74	77,27	5,86	6,20	64,55	65,15	623,25	634,85
Takalar	80,09	81,80	6,21	6,42	68,38	69,89	625,49	634,76
Gowa	79,78	82,32	6,36	7,23	71,07	71,78	630,40	641,00
Sinjai	86,44	86,98	6,62	7,07	71,07	72,24	600,64	612,34
Maros	82,60	83,10	6,47	6,88	70,78	72,76	627,89	640,04
Pangkep	85,60	87,55	6,52	6,94	68,27	68,96	617,50	630,10
Barru	87,66	89,23	7,17	7,62	67,92	69,05	623,98	635,74
Bone	84,78	86,41	6,21	6,70	68,59	70,00	628,50	540,31
Soppeng	84,59	86,67	6,85	7,25	71,30	71,74	628,30	640,46
Wajo	81,68	84,97	5,80	6,50	69,54	71,37	630,71	640,11
Sidrap	89,52	89,98	7,20	7,25	71,42	72,81	621,67	629,70
Pinrang	89,10	90,46	6,88	7,61	71,23	72,28	630,60	639,83
Enrekang	89,76	90,44	8,14	8,30	74,25	75,19	619,42	628,53
Luwu	91,47	91,63	7,70	7,80	72,55	74,04	619,80	633,08
Tator	83,80	87,76	7,43	7,74	74,06	74,22	604,05	605,84
Luwut	92,03	92,86	7,00	7,46	70,91	71,68	637,85	653,06
Lutim	93,13	93,24	7,47	8,17	70,61	71,06	620,99	627,72
Torut		85,28		7,41		73,58		602,89
Makassar	96,62	96,79	10,50	70,82	72,75	73,82	639,83	651,28
Pare-pare	96,20	97,16	9,45	9,84	73,56	74,49	634,12	643,84
Palopo	97,30	97,33	9,66	10,03	72,02	72,59	625,79	637,12

Sumber : BPS Sulawesi Selatan 2012

Apabila dilihat dari ranking mulai tahun 2007 sampai tahun 2011 yang diurutkan berdasarkan angka IPM tertinggi hingga terendah, ketiga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan menempati tiga urutan IPM tertinggi yaitu kota Makassar menduduki posisi pertama, kota Pare-Pare menduduki posisi kedua dan kota Palopo di posisi ketiga. Sedangkan untuk daerah yang menempati ranking terendah adalah Kabupaten Jeneponto yang mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2011 berada di ranking terendah, Selanjutnya Kabupaten Takalar dan Kabupaten Selayar yang berada pada urutan kedua dan ketiga terendah

diantara Kabupaten/Kota yang lain. Sementara itu bila dilihat dari angka pembentuk IPM, dalam kurun waktu 2007 sampai 2011 ketiga kota di Sulawesi Selatan peringkatnya juga berada diatas daerah lainnya.

Angka melek huruf pada tahun 2007 yang tertinggi adalah Kota Pare Pare sebesar 97,30 persen dari jumlah penduduk diatas usia 15 tahunnya yang mampu membaca dan menulis, hal ini juga terjadi lima tahun kemudian, tahun 2011 Pare Pare masih menempati urutan pertama dengan 97,33 dalam angka melek huruf. Namun bila diperhatikan selama lima tahun tersebut Kota Pare Pare hanya mampu menaikkan angka melek hurufnya sebesar 0,03 persen jauh dibawah Kab Jeneponto yang mampu menaikkan angka melek huruf sebesar 1,53 persen dalam lima tahun walaupun masih berada pada urutan terendah dalam peringkat angka melek huruf di Sulawesi Selatan.

Makassar menjadi daerah yang mempunyai rata-rata lama sekolah yang tertinggi di Sulawesi selatan dalam lima tahun terakhir, sedangkan Bantaeng menjadi daerah dengan rata-rata lama sekolah terendah dalam lima tahun terakhir dari tahun 2007 sampai 2011. Angka harapan hidup di Sulawesi selatan tahun 2007 sampai 2011 tertinggi adalah Kab Enrekang dan yang terendah adalah Kab Jeneponto.

Tahun 2007 penduduk Kota Makassar mempunyai daya beli tertinggi dibanding daerah lainnya dan Kab Sinjai menjadi menjadi yang terendah. Tetapi pada tahun 2011 yang tertinggi bukan lagi Kota Makassar melainkan daerah lain yaitu Kab Luwu Utara yang berada diatas tiga Kota yang ada di Sulawesi Selatan dan yang terendah adalah Kab Bone. Sehingga bila diamati peringkat IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan juga tidak terlalu jauh berbeda bila dilihat lebih mendalam dari angka pembentuknya.

4.3 Hasil Analisis Ekonometrika

4.3.1 Hasil Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Ketimpangan Wilayah

Hasil regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan wilayah pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2007-2011, menggunakan software Eviews 7 dengan metode Pooled IV/ Two-Stage EGLS(Cross-section weights) diperoleh hasil regresi sebagai berikut.

Tabel 4.6
Hasil Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Ketimpangan Wilayah

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	62.29859	3.339184	18.65683	0.0000
X?	1.166527	0.490296	2.379230	0.0193
R-squared	0.832934	Mean dependent var		106.0303
Adjusted R-squared	0.790727	S.D. dependent var		52.97462
S.E. of regression	3.362441	Sum squared resid		1074.071
F-statistic	15.71502	Durbin-Watson stat		1.315084
Prob(F-statistic)	0.000000	Second-Stage SSR		1293.535
Instrument rank	25			

Sumber : Diolah

4.3.1.1 Hasil Analisis Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil regresi pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2007-2011, menggunakan software Eviews 7 dengan metode Pooled EGLS (Cross-section weights) diperoleh hasil regresi sebagai berikut.

Tabel 4.7
Hasil Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	64.95608	0.747203	86.93233	0.0000
X?	0.773706	0.109808	7.045963	0.0000
R-squared	0.956903	Mean dependent var		192.1291
Adjusted R-squared	0.946016	S.D. dependent var		125.8269
S.E. of regression	2.836275	Sum squared resid		764.2234
F-statistic	87.88917	Durbin-Watson stat		1.420500
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Diolah

4.3.2 Hasil Analisis Ketimpangan Wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil regresi pengaruh langsung ketimpangan wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2007-2011, menggunakan software Eviews 7 dengan metode Pooled EGLS (Cross-section weights) diperoleh hasil regresi sebagai berikut.

Tabel 4.8
Hasil Analisis Pengaruh Ketimpangan Wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	69.75373	0.218064	319.8777	0.0000
Y1?	0.052452	0.024071	2.179030	0.0318
R-squared	0.933428	Mean dependent var		526.2693
Adjusted R-squared	0.916610	S.D. dependent var		184.6660
S.E. of regression	7.347865	Sum squared resid		5129.156
F-statistic	55.50112	Durbin-Watson stat		0.918339
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Diolah

4.3.3 Hasil Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Wilayah

Hasil regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2007-2011, menggunakan software Eviews 7 dengan metode Pooled Least Square(PLS) diperoleh hasil regresi sebagai berikut.

Tabel 4.9

Hasil Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Wilayah

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.552163	3.406466	1.629889	0.1066
X?	0.409690	0.497434	0.823606	0.4123
R-squared	0.817864	Mean dependent var		8.323783
Adjusted R-squared	0.761822	S.D. dependent var		11.86187
S.E. of regression	5.789006	Akaike info criterion		6.556499
Sum squared resid	3049.646	Schwarz criterion		7.230143
Log likelihood	-364.3900	Hannan-Quinn criter.		6.830069
F-statistic	14.59380	Durbin-Watson stat		1.728198
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Diolah

4.3.4 Hasil Uji Statistik

4.3.4.1 Koefisien Determinasi (R-square)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variasi variabel dependen dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien determinan (R^2), yang berada antara nol dan satu. Apabila nilai R^2 semakin mendekati satu, berarti variable-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat.

Tabel 4.9
Hasil Uji Statistik R-square

Hubungan antar variabel	R-square
X ke Y2 melalui Y1	0.832934
X ke Y2 (langsung)	0.956903
X ke Y1	0.817864
Y1 ke Y2	0.933428

Sumber : Diolah

Bila dilihat pada tabel 4.9 diatas diperoleh hasil uji data panel dengan nilai R^2 sebesar 0.832934, yang berarti bahwa 83% variabel kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung melalui ketimpangan wilayah dan sisanya sebesar 17% variabel kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh variabel lain diluar model dalam penelitian ini.

Untuk pengaruh hubungan langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.10 diatas dengan nilai R^2 sebesar 0.956903, hal ini berarti bahwa 95% variabel kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi secara langsung, sementara 5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model dalam penelitian ini. Sementara nilai R^2 yang menjelaskan hubungan langsung ketimpangan wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat (tabel 4.9) sebesar 0.933428 yang berarti 93% prediksi variabel kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel ketimpangan wilayah, sedangkan sisanya sebesar 7% variabel kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Untuk nilai R^2 pada hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah sebesar 0.817864 (tabel 4.9), yang berarti 81% variabel ketimpangan wilayah dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi dan 19% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

4.3.4.2 Pengujian Signifikansi secara Simultan (Uji F)

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji F. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 4.11
Hasil Uji Statistik (Uji F)

Hubungan antar variabel	F-hitung	F-tabel
X ke Y2 melalui Y1	15.71502	3.073763
X ke Y2 (langsung)	86.788917	2.682132
X ke Y1	14.59380	2.682132
Y1 ke Y2	55.50112	2.682132

Sumber : Diolah

Dari hasil regresi (tabel 4.10) diperoleh F-statistik sebesar 15.71502 untuk hubungan tidak langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan wilayah, maka Fstatistik > F-tabel (15.71502>3.073763). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen pada $\alpha = 5\%$ atau pada taraf keyakinan 95% dengan tingkat signifikansi 0.000000.

Sementara untuk hubungan langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat (tabel 4.10) didapat F-statistik sebesar 87.88917,

maka $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ ($87.88917 > 2.682132$). Untuk hubungan langsung ketimpangan wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat (tabel 4.10), diperoleh $F_{\text{statistik}}$ sebesar 55.50112 sehingga $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ ($55.50112 > 2.682132$). Jadi dapat disimpulkan bahwa secara langsung pertumbuhan ekonomi (X) dan ketimpangan wilayah (Y1) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) pada $\alpha = 5\%$ atau pada taraf keyakinan 95% dengan tingkat signifikansi 0.0000 untuk pertumbuhan ekonomi dan 0.000000 untuk ketimpangan wilayah.

Nilai $F_{\text{statistik}}$ pada hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah (tabel 4.10) sebesar 14.59380, maka $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ ($14.59380 > 2.682132$). Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah pada $\alpha = 5\%$ atau pada taraf keyakinan 95% dengan tingkat signifikansi 0.0000 hal ini dapat dilihat dari nilai $t_{\text{statistik}}$ lebih kecil dari t_{tabel} .

4.3.4.3 Pengujian Signifikansi secara Parsial (Uji T)

Uji $t_{\text{statistik}}$ merupakan suatu pengujian secara parsial yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan.

Tabel 4.12
Hasil Uji Statistik (Uji T)

Hubungan antar variabel	T-hitung	T-tabel
X ke Y2 melalui Y1	2.379230	1.657982
X ke Y2 (langsung)	7.045963	1.657870
X ke Y1	0.823606	1.657870
Y1 ke Y2	2.179030	1.657870

Sumber : Diolah

Dari hasil regresi diperoleh T-statistik sebesar 2.379230 untuk hubungan tidak langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan melalui ketimpangan wilayah (tabel 4.11), maka T-statistik >T-tabel ($2.379230 > 1.657982$). Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi (X) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) melalui ketimpangan wilayah pada $\alpha = 5\%$ atau pada taraf keyakinan 95% dengan tingkat signifikansi 0.0193.

Sementara itu dari hasil regresi diperoleh T-statistik sebesar 7.045963 untuk hubungan langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan (tabel 4.11), maka T-statistik >T-tabel ($7.045963 > 1.657870$). Untuk hubungan langsung ketimpangan wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat (tabel 4.11), diperoleh T-statistik sebesar 2.179030 sehingga T-statistik >T-tabel ($2.179030 > 1.657870$). Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi (X) dan ketimpangan wilayah (Y1) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) pada $\alpha = 5\%$ atau pada taraf keyakinan 95% dengan tingkat signifikansi 0.0000 untuk pertumbuhan ekonomi dan 0.0318 untuk ketimpangan wilayah.

Nilai T-statistik pada hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah (tabel 4.11) sebesar 0.823606, maka T-statistik < T-tabel ($0.823606 < 1.657870$). Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah hal ini dapat dilihat dari nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel.

4.4 Pembahasan Hasil Estimasi

4.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Ketimpangan Wilayah

Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi direpresentasikan oleh persentase kenaikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto dan kesejahteraan

masyarakat direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia. Setelah melihat hasil perhitungan dengan menggunakan metode panel data, seperti yang terlihat pada tabel 4.5 dan tabel 4.6, menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembangunan manusia melalui ketimpangan wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara tidak langsung melalui ketimpangan wilayah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dengan nilai koefisien sebesar 1.16527, hal ini berarti apabila pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1% maka indeks pembangunan manusia akan mengalami peningkatan sebesar 1,165%. Sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi turun sebesar 1% maka indeks pembangunan manusia akan turun sebesar 1,165%. Sementara itu hubungan secara langsung pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia diperoleh nilai koefisien sebesar 0.773706, yang berarti apabila terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka indeks pembangunan manusia akan mengalami peningkatan sebesar 0,773%. Sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi turun sebesar 1% maka indeks pembangunan manusia akan turun sebesar 0,773%.

Hubungan positif dan signifikannya variabel pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia melalui ketimpangan wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung di Sulawesi Selatan telah sesuai dengan hipotesis ada. Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dapat memacu investasi untuk selanjutnya membuat daerah menjadi berkembang, dan untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi dan investasi tetap ada maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Subottina yang menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM dapat dijelaskan melalui dua jalur. Jalur

tersebut adalah melalui kebijakan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, faktor-faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk subsektor sosial yang meliputi prioritas dalam pendidikan dan kesehatan dasar. Besarnya pengeluaran tersebut mengindikasikan besarnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia.

Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial seperti masalah pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan kesejahteraan yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Selain itu, investasi di bidang pendidikan secara nyata berhasil mendorong kemajuan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial.

Pertumbuhan ekonomi juga disebabkan oleh faktor kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk, kemajuan teknologi tergantung dari pembentukan modal. Dengan adanya akumulasi modal akan memungkinkan dilaksanakannya spesialisasi sehingga produktifitas tenaga kerja dapat ditingkatkan, dampaknya akan mendorong penambahan investasi (pembentukan modal) dan persediaan modal (*capital stock*), yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kemajuan teknologi dan menambah pendapatan (Adisasmita, 2009). Bertambahnya pendapatan, hal ini berarti adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan.

Pada beberapa kabupaten/kota peningkatan laju pertumbuhan ekonomi juga diikuti oleh meningkatnya IPM kabupaten/kota tersebut, daerah tersebut antara lain adalah Kabupaten Selayar dan Takalar di lima tahun terakhir (2007-2011) yang terus mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi diikuti

dengan peningkatan angka IPM nya. Sedangkan pada kabupaten Wajo yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2011 juga mampu meningkatkan angka IPM yang cukup besar yaitu sebesar 0,82 persen.

Daerah lainnya juga mengalami hal yang tidak berbeda jauh dengan ketiga daerah tersebut diatas, semua Kabupaten/Kota saling berlomba-lomba untuk mendapatkan pertumbuhan yang tinggi dan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya yang diukur dengan IPM.

4.4.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Wilayah

Dari hasil regresi (tabel 4.8) menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel. Hal ini berarti tidak adanya pengaruh antara pertumbuhan ekonomi (X) terhadap ketimpangan wilayah (Y₂) di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil analisis diatas. Bila kita amati secara mendalam daerah-daerah yang memiliki pendapatan dan pertumbuhan yang besar tidak serta merta terbebas dari masalah ketimpangan, hal ini terlihat dari hasil perhitungan indeks ketimpangan yang menunjukkan angka lebih besar dari daerah lain yang kurang maju yang berarti semakin jauh dari nol atau semakin timpang. Daerah tersebut seperti Makassar dan Luwu Timur yang mempunyai pertumbuhan ekonomi dan PDRB yang jauh lebih tinggi dibanding daerah lainnya.

Hasil ini juga tidak sesuai dengan pernyataan Simon Kuznets yang mengatakan pada tahap awal pertumbuhan ekonomi terjadi *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan. Seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi maka setelah menghadapi tahap tertentu *trade-off* tersebut akan menghilang diganti dengan hubungan korelasi positif antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan pada tahap awal pembangunan cenderung dipusatkan pada sektor modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam penyerapan tenaga kerja.

Ketimpangan membesar karena kesenjangan antar sektor modern dan tradisional meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena perkembangan di sektor modern lebih cepat dibandingkan dengan sektor tradisional.

Pendapat Kuznets tersebut tidak sesuai dengan keadaan di Sulawesi Selatan dimana disini hanya sebagian kecil dari total 24 Kabupaten/Kota yang mempunyai perkembangan yang cukup tinggi di sektor modern perekonomiannya. Sebagian besar tenaga kerja juga terserap pada sektor primer perkonomian, yang sebagian juga memberikan kontribusi terhadap kemajuan perekonomian di Sulawesi Selatan misalnya perkebunan, tambang, dan salah satu unggulan yaitu perikanan. Daerah yang sektor modernnya cukup bagus perkembangannya hanya terdapat pada Kota Makassar dan Pare pare sementara sebagian besar dari daerah di Sulawesi Selatan bertumpu pada sektor tradisional. Hal ini juga dipengaruhi oleh sumber daya yang ada, IPM di Sulawesi Selatan yang masih di bawah nasional walaupun pertumbuhannya jauh diatas nasional menunjukkan bagaiman sumber daya manusia Sulawesi Selatan dalam mengembangkan sektor modern.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Devi Retnosari (2006) tentang pengaruh distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, menjelaskan bahwa laju pertumbuhan PDRB yang tinggi ternyata tidak selalu berkaitan dengan perbaikan distribusi pendapatan. Pembangunan memerlukan PDRB yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat, tetapi masalah dasarnya bukan hanya bagaimana menumbuhkan PBRD, tetapi juga siapakah yang akan menumbuhkan PDRB, sejumlah besar masyarakat yang ada di dalam suatu daerah ataukah hanya segelintir orang. Kemudian Garry Field dalam Todaro

(2006) juga menjelaskan tentang tipologi pertumbuhan dan ketimpangan yang sejalan dengan penelitian ini dimana tipologi Field sesuai dengan hasil penelitian.

Pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan merupakan alat penting dalam mengurangi dan meningkatkan standard hidup orang banyak. Keadaan yang mungkin bertolak belakang terjadi ketika pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang tinggi tidak menyebabkan hilangnya ketimpangan, malah jurang ketimpangan semakin melebar, hal ini senada dengan ungkapan Subbotina. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan dengan cepat, membuat kualitas hidup seseorang menjadi menurun, dan akhirnya mengurangi produktifitas ekonomi.

4.4.3 Pengaruh Ketimpangan Wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Setelah melihat hasil perhitungan dengan menggunakan metode panel data, seperti yang terlihat pada tabel 4.7, menunjukkan bahwa variabel ketimpangan wilayah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembangunan manusia di Sulawesi Selatan. Nilai koefisien pengaruh ketimpangan wilayah terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 0,052452, hal ini berarti apabila pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1% maka indeks pembangunan manusia akan mengalami peningkatan sebesar 0,052%. Sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi turun sebesar 1% maka indeks pembangunan manusia akan turun sebesar 0,052%.

Hubungan positif dan signifikannya variabel pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia melalui ketimpangan wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung di Sulawesi Selatan telah sesuai dengan hipotesis ada. Ketimpangan wilayah ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang

terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Pengaruh positif ketimpangan terhadap kesejahteraan juga dijelaskan oleh Todaro (2006), hal ini sesuai dengan hasil penelitian ini, dimana ada korelasi positif antara tingkat pendidikan seseorang dengan penghasilannya seumur hidup. Korelasi ini dapat dilihat terhadap lulusan sekolah tingkat atas (sekolah menengah atas dan universitas) dimana pendapatan mereka beberapa ratus persen lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya lulus sekolah dasar atau kurang dari itu. Hal ini disebabkan karena tingkat penghasilan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jelas ketimpangan pendapatan akan bertambah buruk mengingat para pelajar yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan tinggi jauh lebih besar peluangnya untuk meneruskan pendidikannya sampai ke jenjang yang tertinggi. Dengan demikian, sistem pendidikan yang ada di negara berkembang sesungguhnya justru cenderung mempertahankan atau malah justru memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan di negara tersebut.

Bila melihat data pada beberapa tahun terakhir, indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan dan indeks williamson sebagai representasi ketimpangan wilayah juga mengalami peningkatan. Seperti yang terjadi pada kota Makassar, selama kurun waktu lima tahun mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2011 IPM Kota Makassar selalu mengalami kenaikan akan tetapi juga dibarengi dengan kenaikan indeks williamson yang berarti terjadi ketimpangan yang semakin tinggi.

Sebagian besar daerah di Sulawesi Selatan mengalami kenaikan indeks pembangunan manusia, daerah yang selama ini dikenal sebagai daerah yang masih kurang maju seperti Jeneponto dan Selayar juga mengalami kenaikan

dalam angka indeks pembangunan manusianya. Namun kestabilan kenaikan IPM juga dibarengi dengan fluktuatifnya indeks williamsonnya. Hal ini menjadikan sebuah daerah dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar hanya berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia. Dalam hal ini, IPM juga menyampaikan bahwa pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan manusia dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Variabel pertumbuhan ekonomi (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y2) melalui ketimpangan wilayah (Y1) secara langsung dan tidak langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa bila terjadi kenaikan pada pertumbuhan ekonomi, maka IPM di Sulawesi Selatan juga ikut mengalami kenaikan, dengan demikian hipotesis terbukti.
2. Variabel pertumbuhan ekonomi (X) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah (Y1) pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian hipotesis tidak terbukti. Hal ini diduga karena kesalahan dalam pemilihan variabel sebagai proksi dari ketimpangan wilayah.
3. Variabel ketimpangan wilayah (Y1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y2) pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa bila terjadi kenaikan pada ketimpangan wilayah, maka IPM di Sulawesi Selatan juga ikut mengalami kenaikan, dengan demikian hipotesis terbukti.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan, perlu diperhatikan masalah pertumbuhan ekonomi yang harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-hasilnya pada tiap kabupaten/kota terutama pada kabupaten yang masih memiliki IPM rendah. Kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, dapat diwujudkan melalui alokasi pengeluaran pemerintah pada kegiatan pemenuhan berbagai kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, perlistrikan desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan perlu memperhatikan masalah yang berhubungan dengan pengurangan kemiskinan dengan peningkatan produktivitas masyarakat melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan agar tercipta SDM yang berkualitas sehingga mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan mampu mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.
3. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik sejenis disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel lainnya. Serta memperpanjang periode penelitian, dan menggunakan alat analisis yang lebih akurat untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih bisa mendekati fenomena sesungguhnya dan lebih terpola.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Raharjo. 2009. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Agussalim. 2012. *Penanganan Kemiskinan di Sulawesi Selatan: Pendekatan dan agenda Kebijakan*. Policy Papper
- Anggraeni, Dewi. 2012. *Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Haerani, Wiwin. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Defisit APBN Indonesia Periode Tahun 2001-2010*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Ilham, Irawan. 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Jhingan, M.L. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mapongga, Herwin. 2010. *Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo*. Tesis. Sekolah Pascasarjana. Institute Pertanian Bogor.
- Maqin, R.A. 2006. *Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pembangunan Manusia di Jawa Barat Periode 1993-2003*. Skripsi. www.google.com
- Poli, W.I.M. 2010. *Tonggak-Tonggak sejarah Pemikiran Ekonomi*. Brilliant Internasional. Surabaya.
- Puspandika, Bery Agung. 2007. *Analisis Ketimpangan Ekonomi Daerah Di Era Otonomi Daerah : Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Retnosari, Devi. 2006. *Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat*. Institut Pertanian Bogor.
- Sasana, Hadi. 2009. *Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah, dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di*

- Kabupaten/kota Provinsi Jawa tengah Dalam Era desentralisasi Fiskal.*
Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sitepu, Rusdin Karo-Karo. 2007. *Dampak Investasi Sumber Daya Manusia dan Transfer Pendapatan Terhadap Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan Di Indonesia.* Institut Pertanian Bogor.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi.* Niaga Swadaya
- Soebeno, A. 2005. *Analisis Pembangunan Manusia dan Penentuan Prioritas Pembangunan social Di Jawa Timur.* Tesis. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian bogor.
- Soubbotina, T.P. 2004. *Beyond Economic Growth.* Worl Bank.
- Sudarmono, Mulyanto. 2006. *Analisis Transformasi struktural, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Daerah Di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah.* Universitas Diponegoro. Semarang
- Tadjoedin, M.Z,dkk. 2001. *Aspirasi Terhadap Ketidakmerataan: Disparitas Regional dan Konflik Vertikal di Indonesia.* UNSFIR Working Paper. Jakarta
- Tambunan, T.T.H. 2003. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting.* Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Todaro, M.P dan S.C Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.* Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Yunitasari, Maria. 2007. *Analisis Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.* Skripsi. Institut Pertanian Bogor.

Lampiran 1

Hasil Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan

Masyarakat melalui Ketimpangan Wilayah

Dependent Variable: Y2?

Method: Pooled IV/Two-stage ECLS (Cross-section weights)

Date: 10/23/13 Time: 13:47

Sample: 1 5

Included observations: 5

Cross-sections included: 24

Total pool (balanced) observations: 120

Linear estimation after one-step weighting matrix

Instrument specification: C Y1?

White cross-section standard errors & covariance (no d.f. correction)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	62.29859	3.339184	18.65683	0.0000
X?	1.166527	0.490296	2.379230	0.0193
Fixed Effects (Cross)				
_SELAYAR-- C	-2.562851			
_BULUKUMB A--C	0.679658			
_BANTAENG-- -C	-1.054584			
_JENEPONT O--C	-4.810752			
_TAKALAR-- C	-1.959662			
_GOWA--C	-0.039319			
_SINJAI--C	-0.576695			
_MAROS--C	0.900950			
_PANGKEP-- C	-1.398281			
_BARRU--C	0.811951			
_BONE--C	-0.839617			
_SOPPENG-- C	1.680309			
_WAJO--C	-0.340606			
_SIDRAP--C	1.601773			
_PINRANG-- C	2.916668			
_ENREKANG --C	4.246257			
_LUWU--C	3.549998			
_TORAJA--C	1.355665			
_LUWUTR--C	2.834439			
_LUWTMR--C	2.436991			
_TORAJAUT R--C	-25.38801			
_MAKASSAR-- -C	4.941739			
_PAREPARE-- -C	6.037498			
_PALOPO--C	4.976477			

Effects
Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

		Weighted Statistics		
R-squared		0.832934	Mean dependent var	106.0303
Adjusted R-squared		0.790727	S.D. dependent var	52.97462
S.E. of regression		3.362441	Sum squared resid	1074.071
F-statistic		15.71502	Durbin-Watson stat	1.315084
Prob(F-statistic)		0.000000	Second-Stage SSR	1293.535
Instrument rank		25		

		Unweighted Statistics		
R-squared		0.576276	Mean dependent var	70.19033
Sum squared resid		4743.583	Durbin-Watson stat	1.113388

Lampiran 2

Estimasi Persamaan Regresi Masing-Masing Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

$$Y2_SELAYAR = -2.56285144682 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_SELAYAR$$

$$Y2_BULUKUMBA = 0.679658447449 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_BULUKUMBA$$

$$Y2_BANTAENG = -1.0545839019 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_BANTAENG$$

$$Y2_JENEPONTO = -4.81075187233 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_JENEPONTO$$

$$Y2_TAKALAR = -1.95966200815 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_TAKALAR$$

$$Y2_GOWA = -0.0393188765434 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_GOWA$$

$$Y2_SINJAI = -0.576694762385 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_SINJAI$$

$$Y2_MAROS = 0.900950348078 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_MAROS$$

$$Y2_PANGKEP = -1.3982810832 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_PANGKEP$$

$$Y2_BARRU = 0.81195118793 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_BARRU$$

$$Y2_BONE = -0.839616656137 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_BONE$$

$$Y2_SOPPENG = 1.68030943688 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_SOPPENG$$

$$Y2_WAJO = -0.340605738059 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_WAJO$$

$$Y2_SIDRAP = 1.60177266734 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_SIDRAP$$

$$Y2_PINRANG = 2.91666768582 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_PINRANG$$

$$Y2_ENREKANG = 4.24625736604 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_ENREKANG$$

$$Y2_LUWU = 3.54999821965 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_LUWU$$

$$Y2_TORAJA = 1.35566516627 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_TORAJA$$

$$Y2_LUWUTR = 2.8344387741 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_LUWUTR$$

$$Y2_LUWTMR = 2.43699066098 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_LUWTMR$$

$$Y2_TORAJAUTR = -25.3880080272 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_TORAJAUTR$$

$$Y2_MAKASSAR = 4.94173860131 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_MAKASSAR$$

$$Y2_PAREPARE = 6.0374984036 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_PAREPARE$$

$$Y2_PALOPO = 4.9764774073 + 62.2985858455 + 1.16652669131 * X_PALOPO$$

Lampiran 3

Hasil Analisis Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi terhadap

Kesejahteraan Masyarakat

Dependent Variable: Y2?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 10/23/13 Time: 13:50

Sample: 1 5

Included observations: 5

Cross-sections included: 24

Total pool (balanced) observations: 120

Linear estimation after one-step weighting matrix

White cross-section standard errors & covariance (no d.f. correction)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	64.95608	1.197521	54.24211	0.0000
X?	0.773706	0.170192	4.546073	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_SELAYAR-- C	-2.223913			
_BULUKUMB A--C	0.578638			
_BANTAENG-- -C	-0.900271			
_JENEPONT O--C	-5.127823			
_TAKALAR-- C	-2.024543			
_GOWA--C	-0.076702			
_SINJAI--C	-0.733495			
_MAROS--C	0.683655			
_PANGKEP-- C	-1.329603			
_BARRU--C	0.597013			
_BONE--C	-0.777224			
_SOPPENG-- C	1.535293			
_WAJO--C	-0.247573			
_SIDRAP--C	1.821294			
_PINRANG-- C	2.841574			
_ENREKANG --C	3.955112			
_LUWU--C	3.467048			
_TORAJA--C	1.273500			
_LUWUTR--C	3.052389			
_LUWTMR--C	2.332828			
_TORAJAUT R--C	-26.42394			
_MAKASSAR-- -C	6.001109			
_PAREPARE-- -C	6.422790			
_PALOPO--C	5.302846			

Effects
Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted
Statistics

R-squared	0.956903	Mean dependent var	192.1291
Adjusted R-squared	0.946016	S.D. dependent var	125.8269
S.E. of regression	2.836275	Sum squared resid	764.2234
F-statistic	87.88917	Durbin-Watson stat	1.420500
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted
Statistics

R-squared	0.547244	Mean dependent var	70.19033
Sum squared resid	5068.594	Durbin-Watson stat	1.066588

Lampiran 4

Estimasi Persamaan Regresi Masing-Masing Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

$$Y2_SELAYAR = -2.22391308651 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_SELAYAR$$

$$Y2_BULUKUMBA = 0.578638186689 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_BULUKUMBA$$

$$Y2_BANTAENG = -0.900271034365 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_BANTAENG$$

$$Y2_JENEPONTO = -5.12782324165 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_JENEPONTO$$

$$Y2_TAKALAR = -2.02454281075 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_TAKALAR$$

$$Y2_GOWA = -0.0767022653278 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_GOWA$$

$$Y2_SINJAI = -0.733495491174 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_SINJAI$$

$$Y2_MAROS = 0.683655308891 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_MAROS$$

$$Y2_PANGKEP = -1.32960301869 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_PANGKEP$$

$$Y2_BARRU = 0.597013069928 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_BARRU$$

$$Y2_BONE = -0.777223714786 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_BONE$$

$$Y2_SOPPENG = 1.53529331401 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_SOPPENG$$

$$Y2_WAJO = -0.247572821312 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_WAJO$$

$$Y2_SIDRAP = 1.82129368764 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_SIDRAP$$

$$Y2_PINRANG = 2.84157355809 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_PINRANG$$

$$Y2_ENREKANG = 3.95511212975 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_ENREKANG$$

$$Y2_LUWU = 3.46704768797 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_LUWU$$

$$Y2_TORAJA = 1.27350027498 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_TORAJA$$

$$Y2_LUWUTR = 3.05238851362 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_LUWUTR$$

$$Y2_LUWTMR = 2.33282783864 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_LUWTMR$$

$$Y2_TORAJAUTR = -26.4239403578 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_TORAJAUTR$$

$$Y2_MAKASSAR = 6.00110920362 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_MAKASSAR$$

$$Y2_PAREPARE = 6.42278954721 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_PAREPARE$$

$$Y2_PALOPO = 5.30284552129 + 64.9560799508 + 0.773706493928 * X_PALOPO$$

Lampiran 5

Hasil Analisis Ketimpangan Wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dependent Variable: Y2?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 10/23/13 Time: 14:01

Sample: 1 5

Included observations: 5

Cross-sections included: 24

Total pool (balanced) observations: 120

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	69.75373	0.218064	319.8777	0.0000
Y1?	0.052452	0.024071	2.179030	0.0318
Fixed Effects (Cross)				
_SELAYAR-- C	-1.299466			
_BULUKUMB A--C	0.510335			
_BANTAENG-- -C	-0.456623			
_JENEPONT O--C	-5.844986			
_TAKALAR-- C	-2.036300			
_GOWA--C	-0.216623			
_SINJAI--C	-0.726405			
_MAROS--C	0.359993			
_PANGKEP-- C	-1.295116			
_BARRU--C	0.439294			
_BONE--C	-0.548853			
_SOPPENG-- C	1.535383			
_WAJO--C	0.114853			
_SIDRAP--C	2.444340			
_PINRANG-- C	2.809679			
_ENREKANG --C	3.614385			
_LUWU--C	3.550338			
_TORAJA--C	1.129006			
_LUWUTR--C	3.708584			
_LUWTMR--C	0.622436			
_TORAJAUT R--C	-28.17512			
_MAKASSAR-- -C	6.041718			
_PAREPARE-- -C	7.459001			
_PALOPO--C	6.260148			

Effects
Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted
Statistics

R-squared	0.933428	Mean dependent var	526.2693
Adjusted R-squared	0.916610	S.D. dependent var	184.6660
S.E. of regression	7.347865	Sum squared resid	5129.156
F-statistic	55.50112	Durbin-Watson stat	0.918339
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted
Statistics

R-squared	0.477139	Mean dependent var	70.19033
Sum squared resid	5853.421	Durbin-Watson stat	1.019181

Lampiran 6

Estimasi Persamaan Regresi Masing-Masing Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

$$Y2_SELAYAR = -1.29946561768 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_SELAYAR$$

$$Y2_BULUKUMBA = 0.510334548292 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_BULUKUMBA$$

$$Y2_BANTAENG = -0.456622703834 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_BANTAENG$$

$$Y2_JENEPONTO = -5.84498565675 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_JENEPONTO$$

$$Y2_TAKALAR = -2.03629959705 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_TAKALAR$$

$$Y2_GOWA = -0.216623214285 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_GOWA$$

$$Y2_SINJAI = -0.726404514978 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_SINJAI$$

$$Y2_MAROS = 0.359993086676 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_MAROS$$

$$Y2_PANGKEP = -1.2951157375 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_PANGKEP$$

$$Y2_BARRU = 0.439293888667 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_BARRU$$

$$Y2_BONE = -0.548852966379 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_BONE$$

$$Y2_SOPPENG = 1.53538305593 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_SOPPENG$$

$$Y2_WAJO = 0.114852772095 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_WAJO$$

$$Y2_SIDRAP = 2.44433978941 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_SIDRAP$$

$$Y2_PINRANG = 2.8096794221 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_PINRANG$$

$$Y2_ENREKANG = 3.61438541989 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_ENREKANG$$

$$Y2_LUWU = 3.5503376875 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_LUWU$$

$$Y2_TORAJA = 1.12900646791 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_TORAJA$$

$$Y2_LUWUTR = 3.70858421389 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_LUWUTR$$

$$Y2_LUWTMR = 0.622436417174 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_LUWTMR$$

$$Y2_TORAJAUTR = -28.175123632 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_TORAJAUTR$$

$$Y2_MAKASSAR = 6.04171785982 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_MAKASSAR$$

$$Y2_PAREPARE = 7.45900120494 + 69.7537331359 + 0.052452133842*Y1_PAREPARE$$

$$Y2_PALOPO = 6.26014780613 + 69.7537331359 + 0.052452133842 * Y1_PALOPO$$

Lampiran 7

Hasil Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan

Wilayah

Dependent Variable: Y1?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 10/23/13 Time: 14:04
 Sample: 1 5
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 24
 Total pool (balanced) observations: 120

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.552163	3.406466	1.629889	0.1066
X?	0.409690	0.497434	0.823606	0.4123
Fixed Effects (Cross)				
_SELAYAR-- C	-5.250677			
_BULUKUMB A--C	-2.385825			
_BANTAENG-- -C	-2.824523			
_JENEPONT O--C	2.097105			
_TAKALAR-- C	-2.144516			
_GOWA--C	1.302805			
_SINJAI--C	-5.859649			
_MAROS--C	-1.762357			
_PANGKEP-- C	1.849789			
_BARRU--C	-4.840015			
_BONE--C	-2.076056			
_SOPPENG-- C	-5.295939			
_WAJO--C	-3.513212			
_SIDRAP--C	-3.864132			
_PINRANG-- C	-2.133464			
_ENREKANG --C	-4.133135			
_LUWU--C	-4.616270			
_TORAJA--C	-0.244890			
_LUWUTR--C	-4.553493			
_LUWTMR--C	28.80585			
_TORAJAUT R--C	-4.433363			
_MAKASSAR-- -C	37.90115			
_PAREPARE-	-5.689221			

-C				
_PALOPO--C	-6.335967			
Fixed Effects				
(Period)				
1--C	-0.783650			
2--C	-0.661257			
3--C	2.905735			
4--C	-0.337552			
5--C	-1.123276			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Period fixed (dummy variables)				
R-squared	0.817864	Mean dependent var		8.323783
Adjusted R-squared	0.761822	S.D. dependent var		11.86187
S.E. of regression	5.789006	Akaike info criterion		6.556499
Sum squared resid	3049.646	Schwarz criterion		7.230143
Log likelihood	-364.3900	Hannan-Quinn criter.		6.830069
F-statistic	14.59380	Durbin-Watson stat		1.728198
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 8

Estimasi Persamaan Regresi Masing-Masing Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

$$Y1_SELAYAR = -5.25067746338 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_SELAYAR$$

$$Y1_BULUKUMBA = -2.38582473904 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_BULUKUMBA$$

$$Y1_BANTAENG = -2.82452319513 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_BANTAENG$$

$$Y1_JENEPONTO = 2.09710472381 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_JENEPONTO$$

$$Y1_TAKALAR = -2.14451621282 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_TAKALAR$$

$$Y1_GOWA = 1.3028054919 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_GOWA$$

$$Y1_SINJAI = -5.85964876863 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_SINJAI$$

$$Y1_MAROS = -1.76235651903 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_MAROS$$

$$Y1_PANGKEP = 1.84978921014 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_PANGKEP$$

$$Y1_BARRU = -4.84001465863 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_BARRU$$

$$Y1_BONE = -2.07605575094 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_BONE$$

$$Y1_SOPPENG = -5.2959394666 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_SOPPENG$$

$$Y1_WAJO = -3.51321156567 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_WAJO$$

$$Y1_SIDRAP = -3.86413172392 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_SIDRAP$$

$$Y1_PINRANG = -2.13346427458 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_PINRANG$$

$$Y1_ENREKANG = -4.13313481173 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_ENREKANG$$

$$Y1_LUWU = -4.61627047593 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_LUWU$$

$$Y1_TORAJA = -0.244889855796 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_TORAJA$$

$$Y1_LUWUTR = -4.55349296419 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_LUWUTR$$

$$Y1_LUWTMR = 28.8058527804 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_LUWTMR$$

$$Y1_TORAJAUTR = -4.43336269981 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_TORAJAUTR$$

$$Y1_MAKASSAR = 37.9011512005 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_MAKASSAR$$

$$Y1_PAREPARE = -5.68922087541 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_PAREPARE$$

$$Y1_PALOPO = -6.33596738554 + PER_EFFECT + 5.55216265866 + 0.409689932449 * X_PALOPO$$